



LAPORAN PELAKSANAAN URUSAN STATISTIK DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2024



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

LAPORAN PELAKSANAAN URUSAN STATISTIK DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

Pengarah :

Dra. Jiah Palupi Twihantarti, M.M

Penanggung Jawab:

Sapto Suhardiyo, S.ST, S.T

Penyusun:

Dra. Jeni Preandini, M.Si

Fian Setyaningsih, S.Si

Tris Dianasari, S.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga bahwa tugas Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi Kewenangan Daerah meliputi:

1. Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah;
2. Sub Urusan Aplikasi Informatika, yaitu:
 - Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di Lingkup Pemerintah Daerah;
 - Pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah.
3. Sub Urusan Persandian untuk Pengamanan informasi yaitu:
 - Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah
 - Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.
4. Sub Urusan Statistik Sektoral yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah

Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud, Dinkominfo juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai walidata daerah yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun standar data dan format metadata, dan daftar istilah untuk data yang disusun, dikumpulkan, dan diolah oleh Produsen Data melalui koordinasi bersama Pembina Data;
- b. pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi serta analisis data;
- c. menerima dan menghimpun data yang disampaikan oleh Produsen Data;
- d. memastikan metadata melekat pada data yang disampaikan oleh Produsen Data;
- e. memastikan metadata yang melekat pada data sesuai dengan format yang dibakukan oleh Pembina Data;
- f. memastikan data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data, termasuk Kode Referensi berdasarkan rekomendasi Pembina Data;

- g. memastikan data yang dihasilkan pihak non pemerintah, baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data;
- h. membuka semua data dan metadata yang diperoleh dari Produsen Data di laman resmi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Pembina Data, Walidata di Produsen Data lain, dan pihak non pemerintah;
- j. memperhatikan kebutuhan data Produsen Data lain dan masyarakat dan merekomendasikan penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan data tersebut kepada Produsen Data;
- k. merencanakan penanganan dan penyimpanan data untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan data, sehingga investasi terhadap data dan manfaatnya dapat diperoleh secara maksimal untuk kepentingan pembangunan kabupaten dan masyarakatnya; dan
- l. mengelola dan menyebarluaskan Data.

Dalam memenuhi tugas dan fungsi tersebut, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian selaku pelaksana kegiatan statistik di lingkup Daerah didukung oleh sumber daya dan juga dihadapkan dengan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Untuk meningkatkan kinerja di urusan statistik telah dilakukan upaya identifikasi permasalahan dan tindakan perbaikannya sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada.

Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan statistik yang efektif dan berkualitas akan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perencanaan pembangunan serta pengambilan kebijakan di tingkat daerah Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, Desember 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purbalingga



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dra. Jiah Palupi Twihantarti, M.M
NIP. 19650519 198803 2 006

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| RINGKASAN EKSEKUTIF | 2 |
| DAFTAR ISI..... | 4 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2 DASAR HUKUM | 2 |
| 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN..... | 3 |
| 1.4 RUANG LINGKUP | 3 |
| 1.5 OUTPUT YANG DIHARAPKAN..... | 3 |
| 1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 5 |
| 2.1 VISI DAN MISI KABUPATEN PURBALINGGA | 5 |
| 2.2 SATU DATA INDONESIA | 6 |
| 2.3 DATA STATISTIK | 6 |
| 2.4 DATA STATISTIK SEKTORAL..... | 7 |
| 2.4 DATA SPASIAL | 7 |
| BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN STATISTIK TAHUN 2024 | 8 |
| BAB IV PENILAIAN KINERJA WALIDATA DAN RENCANA TINDAK LANJUT 2025 | 44 |
| BAB V PENUTUP..... | 63 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional yakni meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi, yang diukur melalui pembangunan manusia dengan memperhatikan tingkat kualitas hidup manusia di setiap daerah. Pengumpulan data secara berkala diperlukan untuk menilai perkembangan berbagai bidang pembangunan. Dalam mewujudkan pembangunan daerah secara berkala, diperlukan pengolahan data terbaru sesuai dengan prinsip ilmu statistika.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, data statistik diartikan sebagai angka yang mencerminkan karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh melalui pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia melibatkan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data. Adapun data yang dapat digunakan untuk mendukung program di suatu daerah dapat terdiri dari data statistik serta data dan informasi geospasial. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, pengelolaan data dan informasi geospasial diselenggarakan oleh suatu simpul jaringan. Simpul jaringan merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan data serta informasi geospasial.

Di samping itu, data statistik memiliki peran penting dalam beberapa kebijakan publik, karena merupakan alat penting dalam pengetahuan dan kebijakan publik yang rasional. Para pembuat kebijakan publik membutuhkan informasi yang dapat dipercaya untuk mendukung pengambilan keputusan yang rasional. Dengan demikian, data statistik dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program, baik secara langsung maupun tidak langsung.

1.2 DASAR HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Penyelenggaraan Statistik di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Single Data System Untuk Pembangunan Daerah Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 52);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 7).
13. Peraturan bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Kabupaten Purbalingga.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah untuk menyediakan data statistik yang akurat dan relevan sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga. Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyajikan capaian dalam kegiatan statistik yang dilakukan selama tahun 2024.
- b. Mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan statistik.
- c. Evaluasi kinerja terhadap kegiatan statistik yang telah dilaksanakan.
- d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan data statistik di lingkup Kabupaten Purbalingga.
- e. Menyediakan informasi yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum mengenai kondisi dan perkembangan di Kabupaten Purbalingga.

1.4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan penyelenggaraan statistik di Kabupaten Purbalingga mencakup mekanisme dan prosedur penyelenggaraan statistik.

1.5 OUTPUT YANG DIHARAPKAN

Keluaran/output berupa dokumen laporan Penyelenggaraan Kegiatan Statistik di Lingkup Kabupaten Purbalingga.

1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik di Lingkup Kabupaten Purbalingga terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

BAB II Tinjauan Pustaka

BAB III Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Walidata

BAB IV Pelaksanaan Kegiatan Statistik Tahun 2024

BAB V Penilaian Kinerja Walidata Dan Rencana Tindak Lanjut 2025

BAB VI Penutup

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 VISI DAN MISI KABUPATEN PURBALINGGA

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dan harus sejalan dalam mencapai tujuan bersama guna merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Adapun menurut Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah

**“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat
Sejahtera yang Berakhlak Mulia”**

Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat
- b. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
- e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja
- f. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.2 SATU DATA INDONESIA

Satu Data Indonesia merupakan inisiatif pemerintah Republik Indonesia yang bertujuan untuk mengintegrasikan, menyatukan, dan membagikan data dari berbagai instansi pemerintah dalam satu platform terpusat. Dasar hukum untuk Satu Data Indonesia dapat ditemukan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Program ini mendorong pemerintah dan lembaga publik untuk berkolaborasi dalam pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data. Dengan demikian, Satu Data Indonesia bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi, efisiensi pelayanan publik, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Satu Data Indonesia memiliki dampak positif pada berbagai sektor, seperti perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi program-program pemerintah. Dengan akses yang lebih mudah ke data yang terintegrasi, pihak-pihak terkait dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efisien.

Data dukung yang dapat diakses melalui Satu Data Indonesia mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Keberhasilan program ini dapat diukur melalui peningkatan kualitas informasi yang disediakan, efisiensi proses administratif, dan dampak positif pada pembangunan berkelanjutan.

Satu Data Indonesia memberikan gambaran holistik tentang kondisi dan potensi Indonesia, serta menjadi landasan untuk pengembangan kebijakan yang lebih terinformasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, inisiatif ini mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan nasional.

2.3 DATA STATISTIK

Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 menjelaskan arti kata Statistik yaitu data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, data merupakan bukti yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat sedangkan statistik merupakan data yang berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolong-golongkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala.

2.4 DATA STATISTIK SEKTORAL

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 menjelaskan arti statistik sektoral yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan suatu instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Sedangkan statistik dasar merupakan statistik yang dimanfaatkan untuk keperluan yang bersifat luas oleh pemerintah dan masyarakat. Ciri-ciri statistik dasar adalah data lintas sektor, makro, dan berskala nasional. Statistik Sektoral dimanfaatkan oleh instansi tertentu untuk memenuhi tugas pokok instansi tersebut

2.4 DATA SPASIAL

Pentingnya penyelenggaraan data spasial daerah seperti diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial yang telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, antara lain menjamin ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terintegrasi untuk kepentingan pembangunan nasional dan daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Data dan informasi Geospasial Tingkat Daerah, data geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Data spasial mengandung koordinat geografis, seperti lintang dan bujur, serta informasi tambahan yang terkait dengan lokasi tersebut. Pemanfaatan data spasial sangat luas dan mencakup berbagai bidang seperti pemetaan, perencanaan kota, lingkungan, transportasi, maupun mitigasi bencana.

BAB III

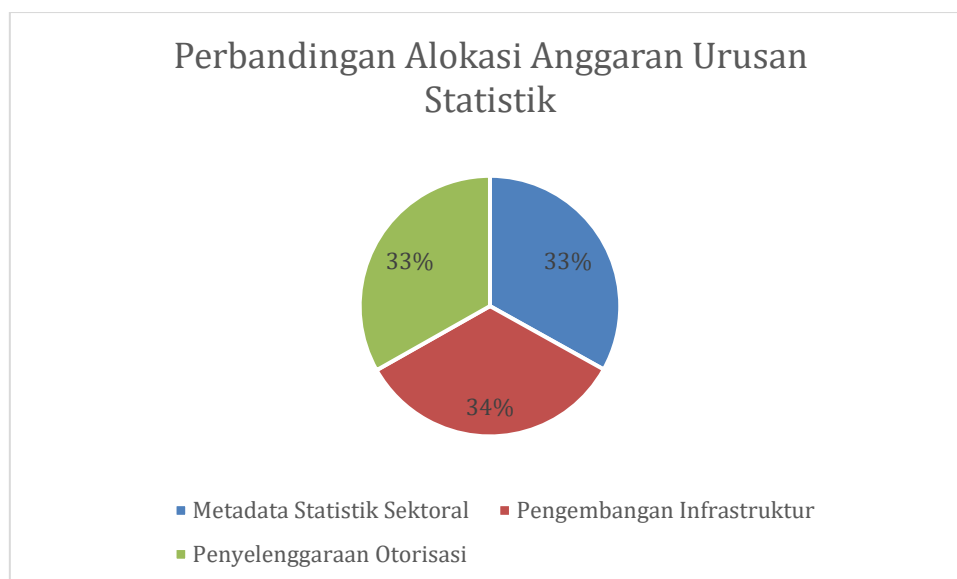
PELAKSANAAN KEGIATAN STATISTIK TAHUN 2024

Pada tahun 2024, urusan statistik di Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi Statistik (ITIKSP) Dinkominfo Kabupaten Purbalingga terdapat 3 sub kegiatan yaitu Membangun Metadata Statistik Sektoral, Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah, dan Pengembangan Infrastruktur. Pada sub kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral terdapat perubahan anggaran yaitu penambahan sebesar Rp. 10.000.000. Adapun realisasi penggunaan anggaran pada urusan statistik adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi urusan Statistik

| No | Sub Kegiatan | Anggaran 2023 | Anggaran 2024 | Realisasi | Persentase Capaian |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Rp. 6.400.000 | Rp. 16.400.000 | Rp. 16.348.900 | 99.6884% |
| 2 | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Daerah | Rp. 21.157.000 | Rp. 16.449.000 | Rp. 16.437.000 | 99.9270% |
| 3 | Pengembangan Infrastruktur | Rp. 15.810.000 | Rp. 16.719.000 | Rp. 16.698.650 | 99.8783% |
| Total | | Rp. 43.367.000 | Rp. 49.568.000 | Rp. 49.484.550 | 99.8316% |

Proporsi alokasi anggaran statistik adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Proporsi Alokasi Anggaran Urusan Statistik

Dari jumlah anggaran yang telah dialokasikan, terlaksana kegiatan untuk menunjang urusan statistik, sebagai berikut:

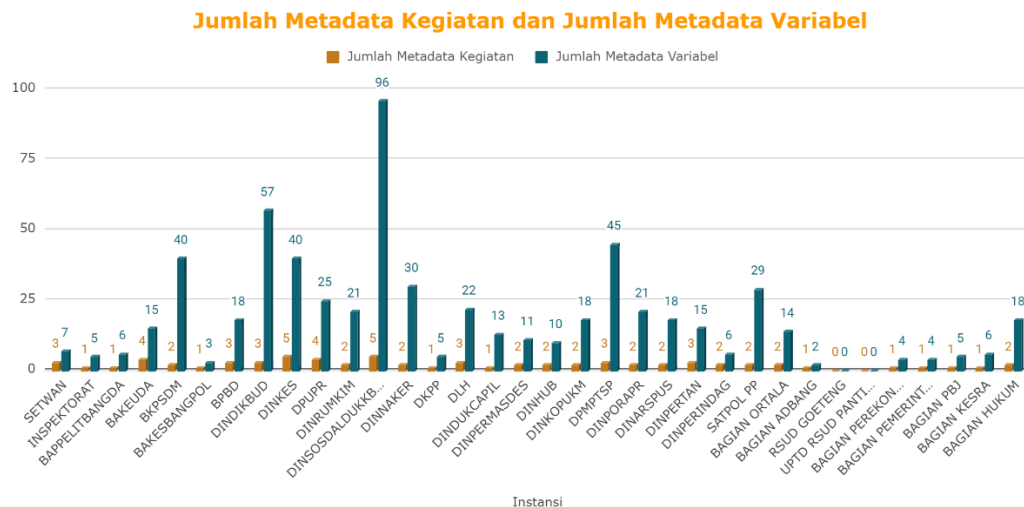
A. Evaluasi Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) dan Progres Upload Data

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021, Satu Data Kabupaten Purbalingga harus diselenggarakan berdasarkan prinsip bahwa data yang dihasilkan oleh setiap produsen data (Organisasi Perangkat Daerah) harus memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga selaku Walidata Daerah bertugas untuk memastikan bahwa data yang disampaikan produsen data haruslah sesuai dengan prinsip SDI.

Kegiatan evaluasi prinsip SDI dan progres *upload* data dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana OPD telah mematuhi prinsip Satu Data dan mengevaluasi progres data yang telah terunggah di Portal Satu Data Purbalingga. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 23 Januari 2024 bertempat di Ruang Ardilawet Setda Kabupaten Purbalingga dengan peserta Admin Satu Data OPD.

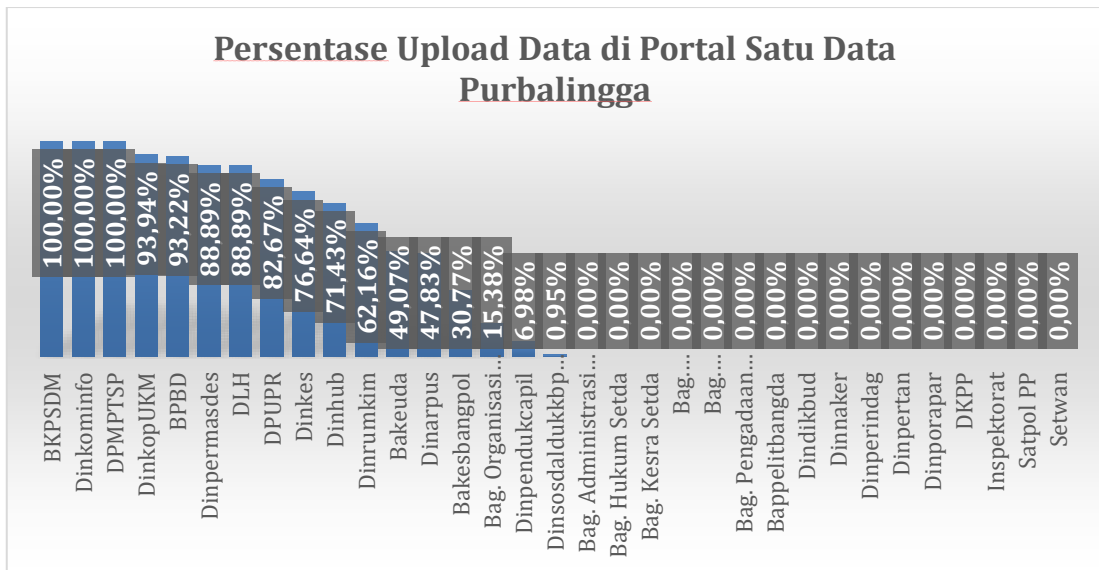
Adapun progres pengisian metadata yang merupakan salah satu prinsip SDI pada aplikasi OMAE adalah sebagai berikut:

- 70 metadata kegiatan dikembangkan dan siap divalidasi
- 629 metadata variabel dikembangkan dan siap divalidasi
- 1996 metadata indikator telah tervalidasi pada tahun 2023.



Gambar 2. Jumlah Metadata Kegiatan dan Variabel

Per 22 Januari 2024 sebanyak 6.612 dataset telah terunggah di Portal Satu Data Kabupaten Purbalingga dengan rincian data statistik sektoral periode 2018-2023 yang terunggah adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Persentase Upload Data di Portal Satu Data Purbalingga

Dikarenakan rendahnya progres upload data di Portal Satu Data Purbalingga yang tercermin dari masih banyaknya produsen data yang belum mencapai persentase 100% dan kebutuhan akan validasi metadata kegiatan serta metadata variabel oleh produsen data, maka diselenggarakan kegiatan desk *upload* data dan metadata statistik sektoral.

B. Desk *Upload* Data dan Metadata Statistik Sektoral

Desk *upload* data dan metadata statistik sektoral dilaksanakan pada Selasa, 30 Januari s.d Selasa, 13 Februari 2024 di Aula Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. Kegiatan desk tersebut bertujuan untuk:

- a. Pengisian dan *updating* data prioritas SDI Kabupaten Purbalingga
- b. Pendampingan *upload* data di Portal Satu Data Purbalingga
- c. Pendampingan pengisian metadata kegiatan dan metadata variabel.

Adapun kendala yang dihadapi Admin Satu Data dalam mengunggah data ke dalam Portal Satu Data Kabupaten Purbalingga adalah:

- a. Gagal *login* ke dalam portal.

Solusi : menggunakan *incognito window* atau *inprivate window*

- b. Tampilan *preview* tabel data yang telah diunggah ke portal menyatu ke dalam satu kolom.

Kendala tersebut disebabkan karena separator file .csv yang digunakan adalah *semicolon*. Sedangkan pengaturan *default* portal, separator file .csv yang digunakan adalah koma.

Solusi : menggunakan *google spreadsheet* untuk membuat file .csv

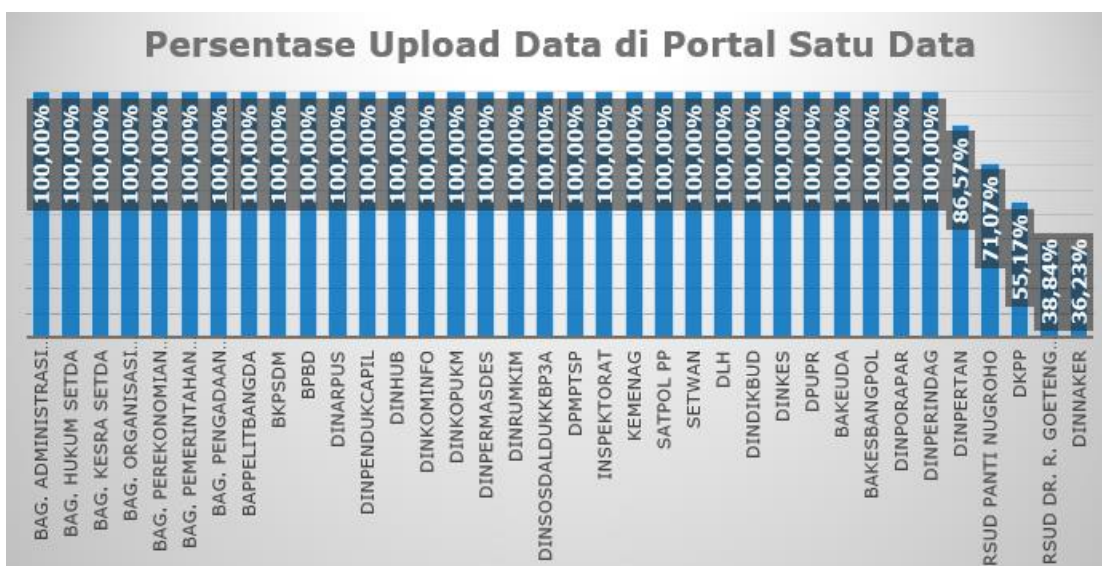
- c. Dataset gagal disimpan dikarenakan pada pengisian *url* terdapat batasan jumlah karakter.

Solusi : Kolom *url* otomatis terisi ketika menginput judul indikator. Jumlah karakter pada kolom *url* dapat disesuaikan secara manual dan tidak mempengaruhi pengisian kolom judul indikator.

- d. Data tahun 2023 yang masih belum dirilis mengakibatkan persentase *upload* belum dapat mencapai 100%.

Terdapat produsen data yang sudah melakukan update data di Portal Satu Data Purbalingga namun belum melakukan *update* pada spreadsheet <https://s.id/SDlpurbalingga>. Sehingga data pada portal dan *database* SDlpurbalingga belum sinkron.

Setelah dilaksanakan desk, sebanyak 25 OPD telah menyelesaikan *upload* data di Portal Satu Data Purbalingga dengan rincian sebagai berikut (per 23 Desember 2024 pukul 08.00 WIB).



Gambar 4. Persentase Upload Data di Portal Satu Data Purbalingga

Sebagian besar OPD telah mencapai progres 100% sehingga terdapat peningkatan yang signifikan setelah dilaksanakan kegiatan desk. Selain desk *upload* data, dilaksanakan pula desk pengisian dan validasi metadata kegiatan serta variabel. Adapun rencana tindak lanjut setelah desk tersebut adalah penyusunan buku metadata kegiatan dan metadata variabel.

C. Penyusunan Buku Metadata Kegiatan dan Variabel

Metadata statistik sektoral terdiri dari 3 jenis yakni metadata kegiatan, metadata variabel dan metadata indikator. Pada tahun 2023 Dinkominfo Kabupaten Purbalingga telah menyusun buku Metadata Indikator Statistik Sektoral yang dapat diakses pada laman Portal Satu Data Kabupaten Purbalingga (<https://data.purbalinggakab.go.id/>) dan Bangsa Macapat (<https://banggamacapat.purbalinggakab.go.id/>). Pada tahun 2024, Dinkominfo

Kabupaten Purbalingga menyusun buku Metadata Kegiatan dan Metadata Variabel yang juga tersedia pada kedua laman tersebut.



Gambar 5. Buku Metadata Kegiatan dan Metadata Variabel

Adapun rincian metadata kegiatan dan variabel dari setiap OPD adalah sebagai berikut

Tabel 2. Rincian Metadata Kegiatan dan Variabel

| No | Nama Instansi | Jumlah Metadata Kegiatan | Judul Metadata Kegiatan | Jumlah Metadata Variabel |
|----|-------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 1 | Bag. Administrasi Pembangunan Setda | 1 | Kompilasi Produk Administrasi Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 2 |
| 2 | Bag. Hukum Setda | 2 | 1.Kompilasi Produk Administrasi Data Produk Hukum Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 2.Kompilasi Produk Administrasi Data Lembaga Bantuan Hukum yang Bekerjasama dengan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 18 |
| 3 | Bag. Kesra Setda | 2 | 1.Kompilasi Produk Administrasi Hibah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 2.Kompilasi Produk Administrasi Bantuan Kesejahteraan Keagamaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 6 |
| 4 | Bag. Organisasi Setda | 2 | 1. Kompilasi Produk Administrasi Nilai SAKIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 2. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 14 |

| No | Nama Instansi | Jumlah Metadata Kegiatan | Judul Metadata Kegiatan | Jumlah Metadata Variabel |
|----|--------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 5 | Bag. Perekonomian dan SDA Setda | 1 | Kompilasi Produk Administrasi Data BUMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 4 |
| 6 | Bag. Pemerintahan Setda | 1 | Kompilasi Produk Administrasi Data Program Bidang Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa serta Otonomi Daerah dan Kerjasama Bagian Pemerintahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 4 |
| 7 | Bag. Pengadaan Barang dan Jasa Setda | 1 | Kompilasi Produk Administrasi Data Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 7 |
| 8 | Bakeuda | 4 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompilasi Produk Administrasi Data Laporan Keuangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 2. Kompilasi Produk Administrasi Pendapatan Asli Daerah atas Aset yang menjadi Pendapatan di Kabupaten purbalingga Tahun 2024 3. Kompilasi Produk Administrasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 4. Kompilasi Produk Administrasi Data Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 15 |
| 9 | Bappelitbangda | 2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompilasi Produk Administrasi Penelitian dan Kelitbangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 2. Kompilasi Produk Administrasi Perencanaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 19 |
| 10 | BKPSDM | 2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompilasi Produk Administrasi Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 2. Kompilasi Produk Administrasi Data Peningkatan Kompetensi PNS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 40 |
| 11 | BPBD | 3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompilasi Produk Administrasi Data Kejadian Bencana di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 2. Kompilasi Produk Administrasi Data Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 3. Kompilasi Data Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 17 |

| No | Nama Instansi | Jumlah Metadata Kegiatan | Judul Metadata Kegiatan | Jumlah Metadata Variabel |
|----|----------------|--------------------------|---|--------------------------|
| 12 | Dinarpus | 2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompilasi Produk Administrasi Data Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 2. Kompilasi Produk Administrasi Data Pembinaan Kearsipan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 18 |
| 13 | Dindikbud | 5 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompilasi Produk Administrasi Data Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 2. Kompilasi produk Administrasi Data Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 3. Kompilasi Produk Administrasi Data Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 4. Kompilasi Produk Administrasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 5. Kompilasi Produk Administrasi Data Kebudayaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 46 |
| 14 | Dinpendukcapil | 2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompilasi Produk Administrasi Pencatatan Sipil di Kabupaten purbalingga Tahun 2024 2. Kompilasi Produk Administrasi Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 20 |
| 15 | Dinhub | 2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sensus Kendaraan Wajib uji Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 2. Kompilasi Produk Administrasi Data Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 10 |
| 16 | Dinkes | 5 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompilasi Produk Administrasi Angka Kematian Ibu di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 2. Kompilasi Produk Administrasi Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 3. Kompilasi Produk Administrasi data berat Badan Bayi Lahir Rendah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 4. Kompilasi Produk Administrasi Data Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan di kabupaten purbalingga Tahun 2024 5. Kompilasi Produk Administrasi Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 40 |

| No | Nama Instansi | Jumlah Metadata Kegiatan | Judul Metadata Kegiatan | Jumlah Metadata Variabel |
|----|---------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 17 | Dinkominfo | 3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompilasi Produk Administrasi Data Persandian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 2. Kompilasi Produk Administrasi Data Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 3. Kompilasi Produk Administrasi Data Statistik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 33 |
| 18 | DinkopUKM | 2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompilasi Produk Administrasi Data Koperasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 2. Kompilasi Produk Administrasi Data Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 18 |
| 19 | Dinnaker | 2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompilasi Produk Administrasi Data Ketenagakerjaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 2. Kompilasi Produk Administrasi Data Pengiriman Transmigran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 30 |
| 20 | Dinperindag | 2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompilasi Produk Administrasi Data Neraca Perdagangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 2. Kompilasi Produk Administrasi Data Sarana Perdagangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 6 |
| 21 | Dinpermasdes | 3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompilasi Produk Administrasi Data Kelembagaan Masyarakat Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 2. Kompilasi Produk Administrasi Data Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 3. Kompilasi Produk Administrasi Data indeks Desa Membangun di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 15 |
| 22 | Dinpertan | 3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompilasi Produk Administrasi Data Perkebunan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 2. Kompilasi Produk Administrasi Data Tanaman Pangan & Hortikultura di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 3. Kompilasi Produk Administrasi Data Peternakan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 14 |
| 23 | Dinporapar | 2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompilasi Produk Administrasi Data Wisatawan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 21 |

| No | Nama Instansi | Jumlah Metadata Kegiatan | Judul Metadata Kegiatan | Jumlah Metadata Variabel |
|----|-------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | | | 2. Kompilasi Produk Administrasi Data Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | |
| 24 | Dinrumkim | 3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompilasi Produk Administrasi Data Perumahan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 2. Kompilasi Produk Administrasi Data Permukiman di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 3. Kompilasi Produk Administrasi Data Pertanahan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 25 |
| 25 | Dinsosdaldukkbp3a | 5 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompilasi Produk Administrasi Data Profil Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 2. Kompilasi Produk Administrasi Data Profil Gender di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 3. Kompilasi Produk Administrasi Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 4. Kompilasi Produk Administrasi Cakupan Pelayanan Bidang Sosial di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 5. Kompilasi Produk Administrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 96 |
| 26 | DKPP | 1 | Kompilasi Produk Administrasi Data Perikanan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 5 |
| 27 | DLH | 3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompilasi Produk Administrasi Data Pengelolaan Sampah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 2. Kompilasi Produk Administrasi Data Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 3. Kompilasi Produk Administrasi Data Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 21 |
| 28 | DPMPSTSP | 3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompilasi Produk Administrasi Data Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 2. Kompilasi Produk Administrasi Data Penerbitan Izin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 44 |

| No | Nama Instansi | Jumlah Metadata Kegiatan | Judul Metadata Kegiatan | Jumlah Metadata Variabel |
|---------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|
| | | | 3. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | |
| 29 | DPUPR | 3 | 1. Survey Kondisi Jalan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 2. Kompilasi Produk Administrasi Data Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 3. Kompilasi Produk Administrasi Data Kondisi Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 21 |
| 30 | Inspektorat | 1 | Kompilasi Produk Administrasi Data Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 5 |
| 31 | Kemenag | 1 | Kompilasi Produk Administrasi Data Pendidikan Madrasah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 25 |
| 32 | Bakesbangpol | 1 | Kompilasi Produk Administrasi Data Potensi Konflik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 3 |
| 33 | Satpol PP | 2 | 1. Kompilasi Produk Administrasi Data Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 2. Kompilasi Produk Administrasi Data Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 29 |
| 34 | Setwan | 2 | 1. Kompilasi Produk yang dihasilkan DPRD di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 2. Kompilasi Produk Administrasi Data Anggota DPRD di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 7 |
| Jumlah | | 79 | | 698 |

D. Survei Kebutuhan Data

Dalam upaya mendukung sistem Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta Penyelenggaraan Statistik Sektorial yang sesuai dengan *Generic Statistical Business*

Process Model (GSBPM), Dinas Komunikasi dan Informatika yang berperan sebagai walidata melakukan identifikasi kebutuhan data statistik sektoral yang dibutuhkan oleh berbagai sektor dan instansi pemerintah. Proses identifikasi kebutuhan data penting untuk memastikan bahwa data yang terkumpul memiliki kualitas dan relevansi yang tinggi, serta dapat digunakan secara efektif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan pengguna data dalam rangka meningkatkan kualitas data yang spesifik di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan infrastruktur. Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral dilaksanakan dengan metode sampel probabilitas yaitu teknik yang memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Unit sampel Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral adalah masyarakat umum. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling* yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.

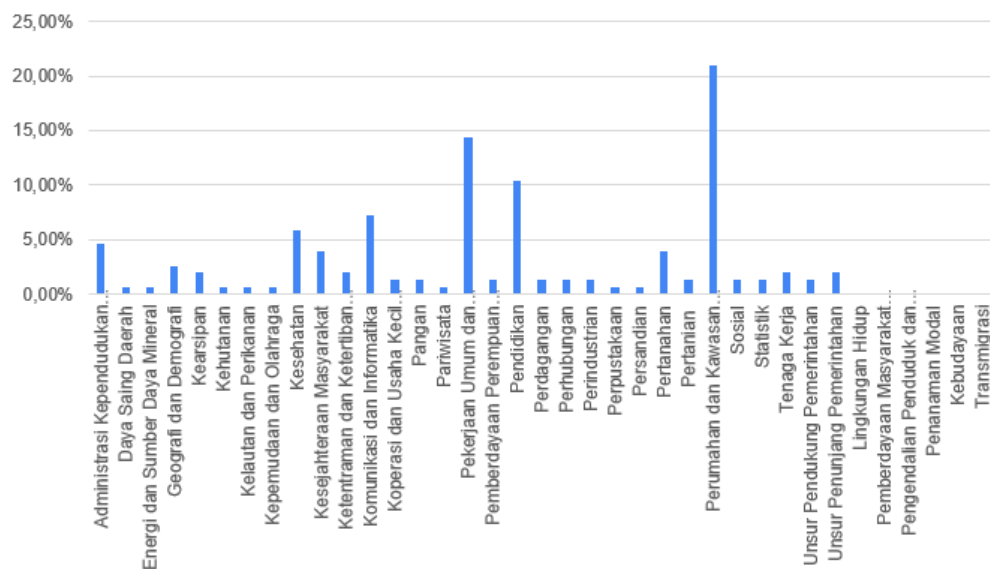
Pengumpulan data dilakukan dengan moda *Computer Assisted Web Interviewing (CAWI)* dimana responden mengisi kuesioner secara mandiri melalui *google form*. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik.

Pada pelaksanaan Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral, ditargetkan jumlah responden sebanyak 384 orang berdasarkan perhitungan menggunakan formula jumlah sampel minimum. Adapun periode pengumpulan data survei adalah 1 Maret s.d 18 Maret 2024. Diperoleh total realisasi responden yang mengikuti survei sebanyak 130 responden. Pencapaian target pengumpulan Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral belum terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan oleh kurang efektifnya metode pengumpulan data dimana responden mengisi kuesioner secara mandiri. Diperlukan metode pengumpulan data wawancara untuk mengatasi kendala responden dalam memberikan jawaban.

Adapun hasil survei kebutuhan data statistik sektoral adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kelompok umur, responden Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral Kabupaten Purbalingga terbanyak adalah responden berumur 26-35 tahun (30,77%) dan 46-55 tahun (30,77%), disusul responden berumur 36-45 tahun (15,38%), responden berumur 16-25 tahun (14,62%) dan responden berumur 56-65 tahun (8,46%).

2. Berdasarkan persentase responden menurut jenis kelamin, responden Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral Kabupaten Purbalingga didominasi oleh laki-laki (59,23%).
3. Responden Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral Kabupaten Purbalingga didominasi oleh responden dengan tingkat pendidikan tertinggi D4/S1 (66,15%).
4. Responden Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral Kabupaten Purbalingga didominasi oleh ASN/TNI/Polri (77,69%).
5. Sebagian besar responden Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral Kabupaten Purbalingga berasal dari pemerintah daerah (83,85%).
6. Sebanyak 60,77% responden survei sudah pernah mengakses Portal Satu Data Purbalingga.
7. Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral menunjukkan bahwa aspek data Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan jenis data yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat dengan persentase sebesar 20,92%. Aspek data merujuk pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari 37 aspek.



Gambar 6. Persentase Data yang Dibutuhkan Responden pada Portal Satu Data Purbalingga menurut Jenis Data

8. Berdasarkan hasil survei, berikut adalah judul data yang dibutuhkan oleh responden secara spesifik.

Tabel 3. Judul Data yang Dibutuhkan Responden

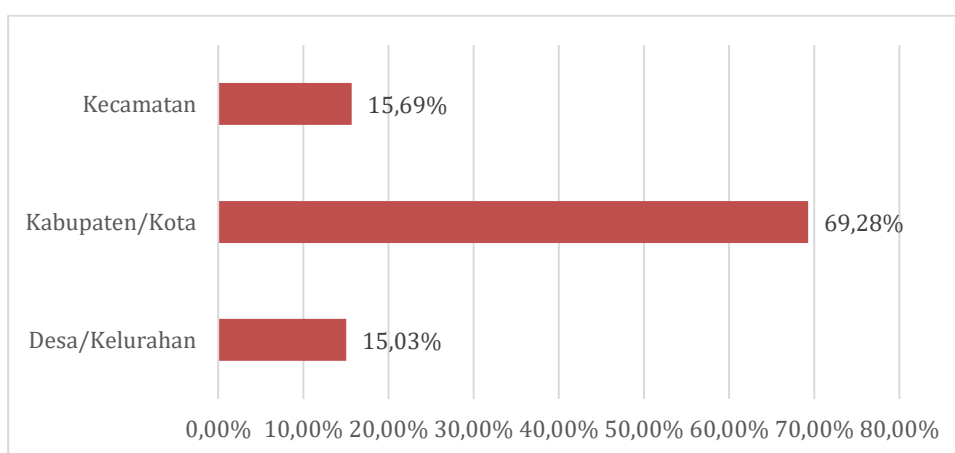
| No | Judul Data |
|----|--|
| 1 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | Air Baku |

| No | Judul Data |
|----|--|
| 3 | Analisis Tingkat Literasi pada Siswa SMK di Wilayah Purbalingga |
| 4 | Angka Kematian Ibu |
| 5 | Angka Kematian Ibu dan Anak |
| 6 | Angka Rasio Guru terhadap Anak SMK |
| 7 | Angka Rasio Guru terhadap Murid SMP |
| 8 | Angka Tenaga Kerja |
| 9 | ASN Dinkominfo |
| 10 | Atlet |
| 11 | Bangunan Irigasi |
| 12 | Batas Bidang Tanah |
| 13 | Bencana Angin Kencang |
| 14 | Bina Marga |
| 15 | BPJS |
| 16 | Covid |
| 17 | Daerah Irigasi |
| 18 | Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten |
| 19 | Daerah Rawan Bencana dan Konflik |
| 20 | Daftar Kawasan Kumuh dan Kurang Mampu |
| 21 | Daftar Wilayah dengan Status Pembayaran Hutang Tersulit |
| 22 | BOR, LOS, TOI dan BTO |
| 23 | Daftar Informasi yang Dikecualikan |
| 24 | Data Spasial Tanah Milik Desa (Bengkok) |
| 25 | Daftar Wilayah dengan Kondisi Ekonomi Menengah ke Bawah |
| 26 | Daya Saing Daerah |
| 27 | Fasilitas Kesehatan |
| 28 | Fasilitas Tera Ulang |
| 29 | Geografi dan Demografi |
| 30 | Harga Pangan |
| 31 | Harga Pupuk dan Alat Pertanian |
| 32 | Internet |
| 33 | Irigasi |
| 34 | Jaringan Irigasi |
| 35 | Jumlah Anak dan Perempuan yang Harus Diurus oleh Kabupaten (Yatim Piatu / Janda) |
| 36 | Jumlah Anggota DPRD |
| 37 | Jumlah Guru |
| 38 | Jumlah Ibu Hamil |
| 39 | Jumlah Jembatan |
| 40 | Jumlah Jiwa |
| 41 | Jumlah Kawasan tidak Kumuh |
| 42 | Jumlah Kelompok IKM yang Bersertifikat |
| 43 | Jumlah Kepala Keluarga |
| 44 | Jumlah Menara Telekomunikasi |
| 45 | Jumlah Penduduk |
| 46 | Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun dan yang Sudah ber-KTP Elektronik |
| 47 | Jumlah PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) |
| 48 | Jumlah Rumah |
| 49 | Jumlah Rumah beserta Luasannya |
| 50 | Jumlah Rumah Layak Huni |
| 51 | Jumlah Rumah Tangga |
| 52 | Jumlah Titik Hotspot/Free Wifi |

| No | Judul Data |
|-----|---|
| 53 | Jumlah Website Aplikasi (Purbalinggakab) yang Aktif |
| 54 | Kawasan Kumuh di Purbalingga |
| 55 | Kearsipan |
| 56 | Kegiatan yang ada di Bidang Bina Marga |
| 57 | Kemiskinan |
| 58 | Kepegawaian |
| 59 | Kesehatan |
| 60 | Kesejahteraan Masyarakat |
| 61 | Kesejahteraan Masyarakat pada Pedesaan yang Jauh dari Pusat Kota |
| 62 | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |
| 63 | Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
| 64 | Kode Klasifikasi Arsip |
| 65 | Komoditas Ekspor |
| 66 | Komunikasi dan Informatika |
| 67 | KTP Anak |
| 68 | Laju Pertumbuhan Penduduk |
| 69 | Lowongan Kerja |
| 70 | Luas Penggunaan Lahan |
| 71 | Luas Ruang Terbuka Hijau |
| 72 | Nama Jembatan |
| 73 | Nama Ruas Jalan |
| 74 | Nama Ruas Jalan Kabupaten |
| 75 | Optimalisasi Sektor Kesehatan di Semua Kalangan Masyarakat |
| 76 | Pariwisata |
| 77 | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 78 | Pemanfaatan Tanah Pemda |
| 79 | Pendidikan |
| 80 | Pengamanan Informasi |
| 81 | Pengguna Internet |
| 82 | Peningkatan UMKM yang Profesional |
| 83 | Penunjang Pemerintahan |
| 84 | Perhubungan |
| 85 | Perikanan |
| 86 | Perpustakaan |
| 87 | Persil Tanah |
| 88 | Pertanahan |
| 89 | Perumahan Dan Permukiman |
| 90 | Peta Kawasan Kumuh |
| 91 | Peta Tanah Eks Bengkok di Kabupaten Purbalingga |
| 92 | Potensi ESDM |
| 93 | Potensi Pertanian |
| 94 | Purbalingga Dalam Angka |
| 95 | Rasio Jumlah Guru Tenaga Pendidik |
| 96 | Realisasi Laporan Ekspor Impor |
| 97 | RTLH |
| 98 | RTLH yang Direhabilitasi |
| 99 | Rumah yang Terakses Air Bersih Sanitasi |
| 100 | Satu Peta untuk Kab.Purbalingga |
| 101 | Sekolah/Madrasah |
| 102 | Standarisasi Harga Material |
| 103 | Statistik Pemilik e-KTP |

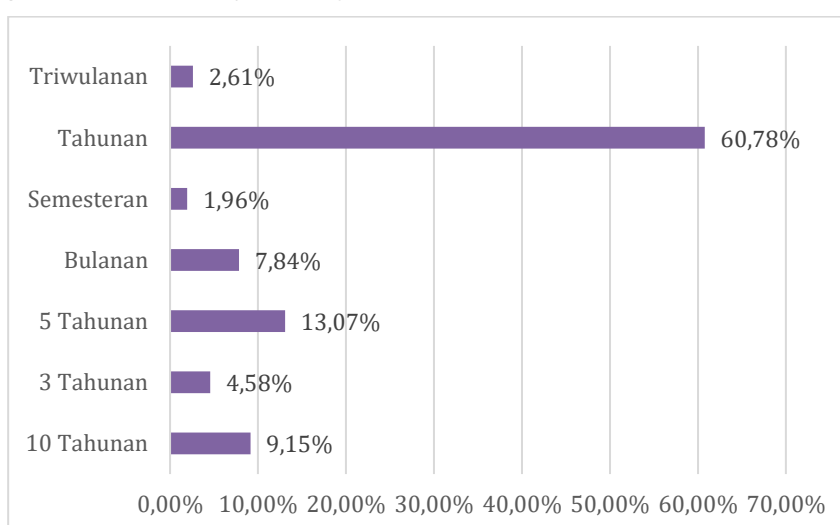
| No | Judul Data |
|-----|---|
| 104 | Sumber Daya Air |
| 105 | Sumber Mata Air |
| 106 | Tata Cara Penarikan Retribusi Tanah Pemda |
| 107 | Terpenuhinya Kebutuhan Air Irigasi |
| 108 | Tingkat Kesehatan Anak Balita |
| 109 | Tingkat Partisipasi Sekolah |
| 110 | Tugas Dan Fungsi Dinkominfo Purbalingga |
| 111 | Vendor Perumahan Yang Tidak Bermasalah |
| 112 | WNA |

9. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar kebutuhan data statistik sektoral Kabupaten Purbalingga adalah data pada level kabupaten/kota (69,28%).



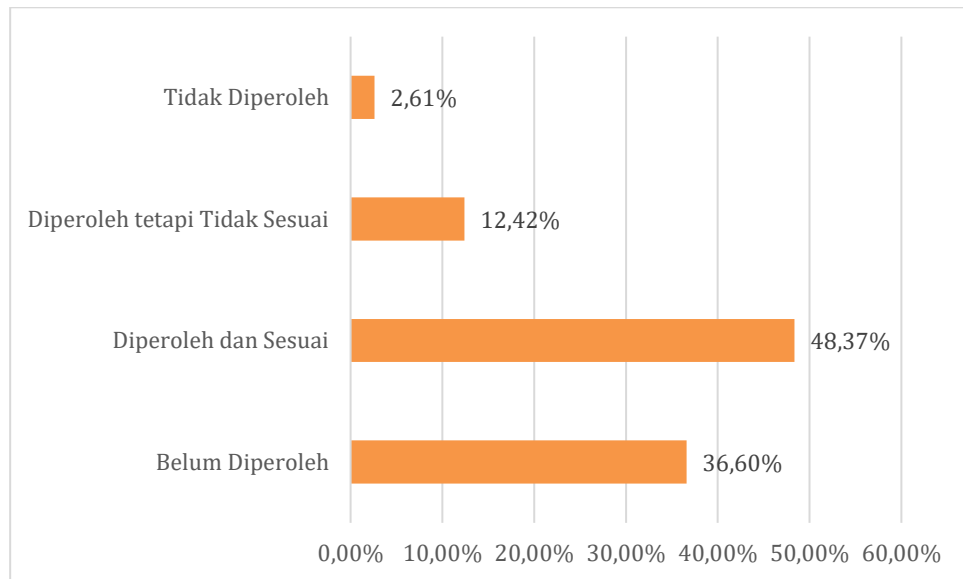
Gambar 7. Persentase Data yang Dibutuhkan Responden pada Portal Satu Data Purbalingga menurut Wilayah Data

10. Berdasarkan hasil survei, sebagian data yang dibutuhkan adalah data dengan periode tahunan (60,78%).



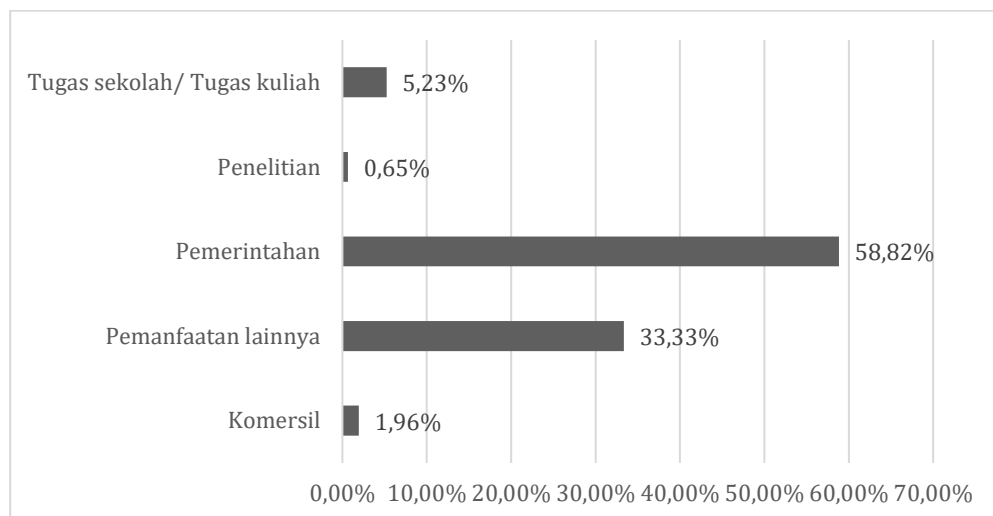
Gambar 8. Persentase Data yang Dibutuhkan Responden pada Portal Satu Data Purbalingga menurut Periode Data

11. Secara umum 48,37% data yang dicari di Portal Satu Data Purbalingga diperoleh dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.



Gambar 9. Persentase Data yang Dibutuhkan Responden di Portal Satu Data Purbalingga menurut Perolehan Data

12. Pemanfaatan data paling banyak dimanfaatkan untuk pemerintahan (58,82%).



Gambar 10. Persentase Data yang Dibutuhkan Responden di Portal Satu Data Purbalingga menurut Pemanfaatan Data

E. Penyusunan Buku Analisis Big Data

Buku Analisis Big Data merupakan publikasi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga yang mengulas fenomena kenaikan harga beras menggunakan analisis Big Data. Publikasi tersebut tersedia pada laman Portal Satu Data Kabupaten Purbalingga (<https://data.purbalinggakab.go.id/>) dan Bangsa Macapat (<https://banggamacapat.purbalinggakab.go.id/>).



Gambar 11. Buku Analisis Big Data

Dalam menganalisis fenomena kenaikan harga beras, terdapat 2 teknik analisis yang digunakan yaitu :

1. Analisa Data Google Trend Index untuk Menggambarkan Pencairan Kueri “Harga Beras”

Dalam melakukan analisis digunakan perangkat lunak software R Studio 4.3.2 dan Excel 2021. Adapun spesifikasi perangkat keras yang digunakan adalah Laptop ASUS dengan processor intel core i5, installed memory (RAM) 16 GB System type 64-bit operating system, x64-based processor. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data Google Trend Index yang dapat diunduh secara gratis di <https://trends.google.co.id/> . Data yang dianalisa adalah data 5 tahun terakhir yang diunduh pada 6 Maret 2024.

Dalam upaya memahami sentimen konsumen dan tren pasar terkait dengan harga beras, pendekatan menggunakan Google Trend Index (GTI). Tantangan utama dalam penggunaan GTI adalah pencarian yang relevan. Dari beberapa kueri hanya 5 kueri yang telah di cek relevansinya dengan kueri pencarian “Harga Beras” adalah “produksi beras”, “musim tanam”, “konsumsi beras”, “harga pupuk” dan “gagal panen”.

Dengan memanfaatkan GTI dan menerapkan kueri pencarian yang relevan diperoleh sebuah model yang mampu menggambarkan pola data aktual dengan tingkat kesalahan Root Mean Square Error (RMSE) sebesar 13.03455. Hasil ini menunjukkan bahwa GTI dapat menjadi alternatif yang kuat dalam mencari celah informasi dalam mengestimasi Topik pencarian kueri “Harga Beras”.

Setelah didapatkan model terbaik, selanjutnya dapat dihitung prediksi skor GTI kueri pencarian “Harga Beras” dengan inisiasi data mingguan yaitu Maret 2024 dengan metode Backpropagation Neural Network diperoleh skor 67.

2. Analisis Sentimen Masyarakat terhadap Harga Beras Menggunakan Data X (Twitter)

Analisis dilakukan dengan bantuan Google Colab dan Microsoft Excel 2021. Data yang digunakan merupakan opini masyarakat pengguna media sosial X mengenai harga beras di Indonesia. Pengumpulan data tweet didasarkan pada kata kunci “harga beras” dengan rentang waktu 24 Februari 2024 sampai 3 Maret 2024. Terkumpul sebanyak 678 data *tweet* yang kemudian disimpan ke dalam file dengan format csv.

Berdasarkan analisis dan pembahasan sentimen terhadap kenaikan harga beras di media sosial X, diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat pengguna media sosial X pada tanggal 24 Februari 2024 sampai 3 Maret 2024 cenderung bersentimen negatif terhadap kenaikan harga beras, hal tersebut dibuktikan dari 482 tweets yang dianalisis dengan pelabelan manual, sebanyak 353 tweets bersentimen negatif dan sebanyak 129 tweets bersentimen positif.

Dalam analisis sentimen, tahapan yang dilakukan meliputi penyaringan dan pelabelan data, kemudian masuk ke tahapan *pre-processing*. Selanjutnya dilakukan pembagian data menjadi data *training* dan data *testing* dengan rasio 80:20, pemberian bobot terhadap setiap term menggunakan metode TF-IDF, melakukan teknik SMOTE, melakukan klasifikasi menggunakan algoritma Random Forest, serta menghitung akurasi model. Klasifikasi tweets menggunakan metode *Random Forest* menghasilkan akurasi sebesar 73,19% yang menunjukkan bahwa kinerja model sudah cukup baik dalam melakukan klasifikasi

F. Kerjasama Pemda Purbalingga dengan BIG

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan data dan informasi geospasial di Kabupaten Purbalingga sebagaimana amanat dari Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu menjalin kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku Pembina Data Spasial tingkat pusat. Adapun kerja sama dengan BIG dituangkan secara resmi di Dokumen Nota Kesepakatan Nomor : 7.6/K.A-BIG/HK.01.03/5/2024 dan Nomor : 488/15/V/2024. Rangkaian pembahasan *draft* Nota Kesepakatan dimulai pada 16 Januari 2024 dan ditandatangani secara seremonial di acara Bimbingan Teknis Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) pada 15 Mei 2024.

Nota Kesepakatan dengan BIG mengatur tentang penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kabupaten Purbalingga dan berlaku selama 5 tahun. Nota Kesepakatan dilampiri dengan Rencana Kerja Sama dari tahun 2024 s.d 2028. Adapun ruang lingkup kerjasama

mencakup Pengembanaan Infrastruktur Informasi Geospasial dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dokumen NKS lengkap dapat dilihat pada laman

<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1R94C6OQ3APOcxlAtrlhU8JTbeBsRqvek>

G. Desk Persiapan Bimtek Geospasial

Sebelum penyelenggaraan Bimtek JIGD, dilaksanakan desk persiapan yang dihadiri oleh Admin Satu Data OPD pada 6-13 Mei 2024 di Aula Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. Adapun agenda desk adalah instalasi QGIS untuk pengolahan data spasial, CatMDEdit untuk pembuatan metadata spasial dan pengecekan kelengkapan data tabular yang akan diubah menjadi data spasial. Data tabular yang dimaksud mengacu pada daftar data spasial Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Data Spasial

| No. | Aspek | Daftar Data Geospasial | Jenis Data Vektor | Sumber Data |
|-----|--------------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| 1 | Geografi dan Demografi | Peta Batas Wilayah Administrasi (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan) | Line | DPUPR |
| 2 | Geografi dan Demografi | Peta Klimatologi/Curah Hujan | Poligon | DPUPR |
| 3 | Geografi dan Demografi | Peta Hidrogeologi | Poligon | DPUPR |
| 4 | Geografi dan Demografi | Peta CAT | Poligon | DPUPR |
| 5 | Geografi dan Demografi | Peta Topografi/Kelerengan | Poligon | DPUPR |
| 6 | Geografi dan Demografi | Peta Morfologi | Poligon | DPUPR |
| 7 | Geografi dan Demografi | Peta Jenis Tanah | Poligon | DPUPR |
| 8 | Geografi dan Demografi | Peta Penggunaan Lahan Eksisting | Poligon | DPUPR |
| 9 | Aspek Kesejahteraan Masyarakat | Peta Lokasi Desa Merah/Lokus Kemiskinan | Poligon | Bappelitbangda |
| 10 | Aspek Pendidikan | Peta Lokasi TK/KB/RA | Point | Dindikbud dan Kemenag |
| 11 | Aspek Pendidikan | Peta Lokasi SD/MI | Point | Dindikbud dan Kemenag |
| 12 | Aspek Pendidikan | Peta Lokasi SMP/MTs | Point | Dindikbud dan Kemenag |
| 13 | Aspek Pendidikan | Peta Lokasi SMA/SMK | Point | Dindikbud |
| 14 | Aspek Pendidikan | Peta Lokasi SLB | Point | Dindikbud |
| 15 | Aspek Pendidikan | Peta Lokasi Perguruan Tinggi | Point | Dindikbud |
| 16 | Aspek Kesehatan | Peta Lokasi Puskesmas | Point | Dinkes |
| 17 | Aspek Kesehatan | Peta Lokasi Rumah Sakit | Point | Dinkes |
| 18 | Aspek Kesehatan | Peta Lokasi Klinik | Point | Dinkes |

| No. | Aspek | Daftar Data Geospasial | Jenis Data Vektor | Sumber Data |
|-----|---|--|-------------------|-------------|
| 19 | Aspek Kesehatan | Peta Sebaran Kasus AKI, AKB, AKABA per Kecamatan/Puskesmas | Point | Dinkes |
| 20 | Aspek Kesehatan | Peta Sebaran Kasus Penyakit Menular Tidak Menular | Point | Dinkes |
| 21 | Aspek Kesehatan | Peta Jumlah Sanitasi Layak per Desa | Poligon | Dinkes |
| 22 | Aspek Kesehatan | Peta Lokasi Desa Sehat Mandiri | Poligon | Dinkes |
| 23 | Aspek Kesehatan | Peta Jumlah Kunjungan Puskesmas | Point | Dinkes |
| 24 | Aspek Kesehatan | Peta Jumlah Tenaga Kesehatan per Puskesmas | Point | Dinkes |
| 25 | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peta Jaringan Jalan Kabupaten | Line | DPUPR |
| 26 | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peta Jaringan Drainase | Line | DPUPR |
| 27 | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peta Jaringan Irigasi Teknis dan Non Teknis (Primer, Sekunder) | Line | DPUPR |
| 28 | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peta Lokasi Daerah Irigasi/ Bangunan Irigasi | Point | DPUPR |
| 29 | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peta Lokasi Mata Air | Point | DPUPR |
| 30 | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peta Lokasi Bangunan Pemerintahan (OPD, Kantor Kecamatan, Kelurahan) | Point | DPUPR |
| 31 | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peta Struktur Ruang RTRW | Line, Point | DPUPR |
| 32 | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peta Pola Ruang RTRW | Poligon | DPUPR |
| 33 | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peta Struktur Ruang RDTR (Purbalingga, Bobotsari) | Line, Point | DPUPR |
| 34 | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peta Pola Ruang RDTR (Purbalingga, Bobotsari) | Poligon | DPUPR |
| 35 | Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Peta Kawasan Kumuh (Luasan SK Terbaru) | Poligon | Dinrumkim |
| 36 | Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Peta Lokasi Rumah Susun | Point | Dinrumkim |
| 37 | Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Peta Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) per Desa | Poligon | Dinrumkim |
| 38 | Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Peta Jumlah Rumah per Kecamatan | Poligon | Dinrumkim |

| No. | Aspek | Daftar Data Geospasial | Jenis Data Vektor | Sumber Data |
|-----|---|--|-------------------|-------------------------|
| 39 | Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Peta Jaringan Air Minum | Line | DPUPR, Dinrumkim & PDAM |
| 40 | Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Peta Cakupan Air Minum per Desa | Poligon | Dinrumkim |
| 41 | Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Peta Cakupan Sanitasi per Desa | Poligon | Dinrumkim |
| 42 | Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Peta Sebaran SPAL | Point | Dinrumkim |
| 43 | Aspek Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat | Peta Potensi Rawan Trantib | Poligon | Satpol PP |
| 44 | Aspek Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat, | Peta Lokasi PMK (Pos Melayani Kebakaran) | Point | Satpol PP |
| 45 | Aspek Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat, | Peta Lokasi Hidran | Point | Satpol PP |
| 46 | Aspek Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat, | Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) | Poligon | BPBD |
| 47 | Aspek Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat, | Peta Lokasi Kejadian Bencana Alam | Point | BPBD |
| 48 | Aspek Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat, | Peta Desa Tangguh Bencana | Poligon | BPBD |
| 49 | Aspek Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat, | Peta Desa Rawan Kekeringan | Poligon | BPBD |
| 50 | Aspek Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat, | Peta Lokasi LSM | Point | Bakesbangpol |
| 51 | Aspek Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat, | Peta Potensi Rawan Konflik | Poligon | Bakesbangpol |
| 52 | Aspek Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat, | Peta Lokasi Parpol (Sekretariat) | Point | Bakesbangpol |
| 53 | Aspek Sosial | Peta Letak Panti | Point | DinsosdaldukKB P3A |
| 54 | Aspek Sosial | Peta Lokasi Sarana Peribadatan | Point | DPUPR |

| No. | Aspek | Daftar Data Geospasial | Jenis Data Vektor | Sumber Data |
|-----|--|---|-------------------|--------------------|
| 55 | Aspek Tenaga Kerja | Peta Jumlah Tenaga Kerja di Setiap Perusahaan (Lokasi Titik Perusahaan) | Point | Dinnaker |
| 56 | Aspek Tenaga Kerja | Peta Jumlah Angkatan Kerja Per Kecamatan | Poligon | Dinnaker |
| 57 | Aspek Tenaga Kerja | Peta Lokasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) | Point | Dinnaker |
| 58 | Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Peta Desa/Kel Layak Anak | Poligon | DinsosdaldukKB P3A |
| 59 | Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Peta Sebaran Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak per Kecamatan | Poligon | DinsosdaldukKB P3A |
| 60 | Aspek Pangan | Peta Lokasi Lumbung Pangan | Point | DKPP |
| 61 | Aspek Pertanahan | Peta Sebaran Bidang Tanah Milik Pemda (Eks Bengkulu) | Poligon | Dinrumkim |
| 62 | Aspek Pertanahan | Peta Sebaran Bidang Tanah Milik Pemda Bersertifikat | Poligon | Bakeuda |
| 63 | Aspek Lingkungan Hidup | Peta Lokasi TPA | Point | DLH |
| 64 | Aspek Lingkungan Hidup | Peta Lokasi TPS | Point | DLH |
| 65 | Aspek Lingkungan Hidup | Peta Lokasi TPS 3R | Point | DLH |
| 66 | Aspek Lingkungan Hidup | Peta Lokasi Bank Sampah | Point | DLH |
| 67 | Aspek Lingkungan Hidup | Peta Lokasi Perusahaan Industri/Pabrik yang memiliki IPAL | Point | DLH |
| 68 | Aspek Lingkungan Hidup | Peta Lokasi Perusahaan Industri/Pabrik yang memiliki TPS B3 | Point | DLH |
| 69 | Aspek Lingkungan Hidup | Peta Lokasi Sebaran RTH yang dikelola DLH | Poligon/ Point | DLH |
| 70 | Aspek Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Peta Kepemilikan KTP-el dan KK per Desa | Poligon | Dindukcapil |
| 71 | Aspek Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Peta Kepemilikan Kartu Identitas Anak per Desa | Poligon | Dindukcapil |
| 72 | Aspek Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Peta Kepemilikan Akta Kelahiran per Desa | Poligon | Dindukcapil |
| 73 | Aspek Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Peta Kepemilikan Akta Perkawinan per Desa | Poligon | Dindukcapil |
| 74 | Aspek Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Peta Jumlah Penduduk Menurut Umur Tunggal per Desa | Poligon | Dindukcapil |
| 75 | Aspek Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Peta Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin per Desa | Poligon | Dindukcapil |
| 76 | Aspek Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Peta Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan per Desa | Poligon | Dindukcapil |

| No. | Aspek | Daftar Data Geospasial | Jenis Data Vektor | Sumber Data |
|-----|--|---|-------------------|--------------------|
| 77 | Aspek Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Peta Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan per Desa | Poligon | Dindikcapil |
| 78 | Aspek Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Peta Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Desa | Poligon | Dindikcapil |
| 79 | Aspek Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Peta Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah per Desa | Poligon | Dindikcapil |
| 80 | Aspek Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Peta Jumlah Penduduk Disabilitas per Desa | Poligon | Dindikcapil |
| 81 | Aspek Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Peta Jumlah Penduduk Menurut Agama per Desa | Poligon | Dindikcapil |
| 82 | Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Peta Lokasi Balai KB | Point | DinsosdaldudKB P3A |
| 83 | Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Peta Status Desa (Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal) | Poligon | Dinpermasdes |
| 84 | Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Peta Jumlah BUMDes per Desa | Poligon | Dinpermasdes |
| 85 | Aspek Perhubungan | Peta Lokasi Terminal | Point | Dinhub |
| 86 | Aspek Perhubungan | Peta Rute Angkutan | Line | Dinhub |
| 87 | Aspek Perhubungan | Peta Lokasi Shelter BRT | Point | Dinhub |
| 88 | Aspek Perhubungan | Peta Lokasi Sebaran LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) | Point | Dinhub |
| 89 | Aspek Perhubungan | Peta Lokasi Fasilitas Perlengkapan Jalan (Traffic Light dan Warning Light)) | Point | Dinhub |
| 90 | Aspek Komunikasi dan Informasi | Peta Lokasi Kantor POS | Point | Dinkominfo |
| 91 | Aspek Komunikasi dan Informasi | Peta Lokasi Stasiun Radio | Point | Dinkominfo |
| 92 | Aspek Komunikasi dan Informasi | Peta Lokasi Menara Telekomunikasi | Point | Dinkominfo |
| 93 | Aspek Komunikasi dan Informasi | Peta Lokasi Yang Terhubung Jaringan Fiber Optik Milik Kabupaten | Point | Dinkominfo |
| 94 | Aspek Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | Peta Sebaran Lokasi Koperasi | Point | DinkopUKM |
| 95 | Aspek Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | Peta Sebaran Lokasi UMKM (Produk Unggulan dan Sentra) | Point | DinkopUKM |
| 96 | Aspek Penanaman Modal | Peta Sebaran Investasi (Lokasi Perusahaan PMA) | Point | DPMPSTSP |
| 97 | Aspek Kepemudaan dan Olah Raga | Peta Lokasi Sarana Olahraga (GOR Goentoer, GOR Mahesa Jenar, Lapangan Futsal) | Point | Dinporapar |
| 98 | Aspek Perpustakaan | Peta Lokasi Perpustakaan (Pegiat Literasi) | Point | Dinarpus |

| No. | Aspek | Daftar Data Geospasial | Jenis Data Vektor | Sumber Data |
|-----|------------------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 99 | Aspek Perpustakaan | Peta Jumlah Binaan Perpustakaan per Desa/Kel | Poligon | Dinarpus |
| 100 | Aspek Kelautan dan Perikanan | Peta Sebaran Lokasi Budidaya Perikanan | Poligon/Point | DKPP |
| 101 | Aspek Pariwisata | Peta Lokasi Obyek Wisata | Poligon/Point | Dinporapar |
| 102 | Aspek Pariwisata | Peta Lokasi Desa Wisata | Poligon/Point | Dinporapar |
| 103 | Aspek Pariwisata | Peta Lokasi Tempat Penginapan (Hotel, Homestay, Guest House) | Point | Dinporapar |
| 104 | Aspek Pertanian | Peta Lahan Baku Sawah (Eksisting) | Poligon | Dinpertan |
| 105 | Aspek Pertanian | Peta Zonasi Kawasan Lahan Pertanian Tanaman Hortikultura Eksisting | Poligon | DPUPR dan Dinpertan |
| 106 | Aspek Pertanian | Peta Zonasi Kawasan Lahan Perkebunan Eksisting | Poligon | DPUPR dan Dinpertan |
| 107 | Aspek Pertanian | Peta Kawasan Peternakan Skala Besar/ Kecil Eksisting | Poligon | DPUPR dan Dinpertan |
| 108 | Aspek Pertanian | Peta Jumlah Kelompok Tani per Desa | Poligon | Dinpertan |
| 109 | Aspek Kehutanan | Peta Kawasan Hutan/ Konservasi | Poligon | DPUPR |
| 110 | Aspek ESDM | Peta Jaringan Listrik | Line | DPUPR |
| 111 | Aspek ESDM | Peta Wilayah Pertambangan | Poligon | DPUPR |
| 112 | Aspek Perdagangan | Peta Lokasi Pasar Tradisional | Point, Poligon | Dinperindag |
| 113 | Aspek Perdagangan | Peta Lokasi Kawasan PKL | Point, Poligon | Dinperindag |
| 114 | Aspek Perindustrian | Peta Lokasi Kawasan Industri/Sentra Industri | Point, Poligon | Dinperindag |
| 115 | Aspek Unsur Pendukung Pemerintahan | Peta Lokasi BUMD Milik Pemerintah | Point | Setda |
| 116 | Aspek Unsur Pendukung Pemerintahan | Peta Sebaran Anggota DPRD per Dapil | Point | Setwan |
| 117 | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan | Peta Jumlah PNS per OPD | Poligon | BKPPD |
| 118 | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan | Peta Lokasi PAD Restoran (Restoran yang ada tapping device) | Point | Bakeuda |
| 119 | Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan | Peta Lokasi ATM Bank Jateng (Terkait untuk pembayaran pajak) | Point | Bakeuda |

H. Bimbingan Teknis Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Admin Satu Data OPD, maka diselenggarakan kegiatan Bimtek Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) yang bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Kegiatan bimtek dilaksanakan pada 15-16 Mei 2024 di Ruang Ardilawet Setda Kabupaten Purbalingga

dan diawali dengan seremonial penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemda Kabupaten Purbalingga dengan BIG. Penandatanganan Nota Kesepakatan diwakili oleh Bapak Agung Widiarto, SE, M.Si Staf Ahli Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Kabupaten Purbalingga dan Bapak Dr.rer.nat Sumaryono Msc selaku Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG).

Adapun materi Bimtek JIGD meliputi:

1. **Statistik Purbalingga Menuju Big Data** yang disampaikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur TIK, Statistik dan Persandian Dinkominfo Kabupaten Purbalingga
2. **Optimalisasi Simpul Jaringan untuk Mendukung Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan** oleh Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (PSKIG) BIG
3. **Pengenalan Penyelenggaraan Informasi Geospasial** oleh Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (PSKIG) BIG
4. **Standar Data, Metadata dan Integrasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Portal Satu Data Indonesia di Kabupaten Purbalingga** oleh Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPIG) BIG
5. **Geoportal untuk Penyebarluasan Informasi Geospasial** oleh Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPIG) BIG.

Output dari kegiatan bimtek ini adalah Admin Satu Data OPD dapat memproduksi data spasial sesuai standar KUGI (Katalog Unsur Geografi Indonesia), menyusun metadata spasial sesuai standar menggunakan aplikasi CatMDEdit dan mengunggah data spasial pada laman Geoportal Kabupaten Purbalingga (<https://geoportal.purbalinggakab.go.id/>). Adapun tindak lanjut dari kegiatan Bimtek JIGD adalah *monitoring* dan evaluasi keterisian data spasial pada Geoportal Purbalingga.

I. **Kerjasama Pemda Kabupaten Purbalingga dengan PPIDS Fakultas Teknik UGM**

Selain kerja sama dengan BIG, Simpul Jaringan dapat bekerja sama dengan PPIDS dalam mengoptimalkan penyelenggaraan data dan informasi geospasial. Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) dibentuk oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi untuk membantu membina simpul jaringan dalam rangka pembangunan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Pemda Kabupaten Purbalingga menginisiasi kerja sama dengan PPIDS Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2024.

Formalisasi kerjasama dituangkan melalui dokumen MoU (*Memorandum of Understanding*) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Rangkaian pembahasan *draft* MoU dan PKS dilaksanakan mulai tanggal 16 Juli 2024 melalui *zoom meeting*. Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan UGM disahkan melalui dokumen Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pembangunan Daerah Melalui Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Purbalingga Nomor : 074/23/KS/VIII/2024 dan Nomor : 11506/UN1.P/HK.08.00/2024 yang ditandatangani pada 9 Agustus 2024. Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan bidang lain yang disepakati.

Untuk melaksanakan kesepakatan bersama tersebut, disusun dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Fakultas Teknik UGM tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial. Penandatanganan PKS Nomor : 790/113/PKS/VIII/2024 dan Nomor : 10409/UN1/FTK/LKFT/HK.08.00/2024 dilakukan pada tanggal 4 September 2024 di Gedung SGLC Fakultas Teknik UGM. Acara penandatanganan PKS dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Bappelitbangda, DPUPR, Dinkominfo dan PPIDS UGM.

Adapun ruang lingkup PKS tersebut adalah

- a. Penyelenggaraan data dan informasi geospasial
- b. Pengembangan simpul jaringan informasi geospasial
- c. Penelitian dan pengembangan pemanfaatan data dan informasi geospasial
- d. Pembinaan SDM bidang informasi geospasial
- e. Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana tertentu untuk mendukung kegiatan para pihak
- f. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh para pihak.

Dokumen lengkap dapat diakses pada laman: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1_m_G0gS6iwX1vG6bzR-IWPnKiK-lKug

J. Desk Keterisian Data Spasial

Menindaklanjuti kegiatan Bimtek JIGD pada 15-16 Mei 2024 dan untuk mengoptimalkan keterisian data spasial di Geoportal Kabupaten Purbalingga maka dilaksanakan desk pada 29 Juli s.d 1 Agustus 2024 di Aula Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. Kegiatan desk dihadiri oleh Admin Satu Data OPD yang memproduksi data spasial.

Hasil dari kegiatan desk tersebut adalah adanya usulan penambahan data prioritas spasial yaitu Peta Jumlah Wajib Pajak per Kecamatan (Bakeuda), Peta Dampak Cuaca Ekstrim (BPBD) dan Peta Lokasi Obyek Pemeriksaan yang Diperiksa (Inspektorat). Selain itu, terdapat usulan pengurangan data prioritas spasial yaitu

Peta Desa/Kelurahan Layak Anak dan Peta Sebaran Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak per Kecamatan (Dinsosdaldukkb3a).

Berikut adalah progres keterisian data spasial di Geoportal Kabupaten Purbalingga per 19 Desember 2024 :

Tabel 5. Keterisian Data Spasial di Geoportal Purbalingga

| No. | Instansi | Jumlah Data Spasial yang Terunggah |
|---------------|----------------|------------------------------------|
| 1. | Dinkominfo | 4 |
| 2. | Bappelitbangda | 1 |
| 3. | DPUPR | 66 |
| 4. | Setwan | 1 |
| 5. | Inspektorat | 1 |
| 6. | Bakeuda | 4 |
| 7. | BKPSDM | 1 |
| 8. | BPBD | 25 |
| 9. | BPS | 455 |
| 10. | Dindikbud | 3 |
| 11. | Dinkes | 6 |
| 12. | Dinrumkim | 6 |
| 13. | Dinsos | 2 |
| 14. | Dinnaker | 1 |
| 15. | DKPP | 3 |
| 16. | DLH | 2 |
| 17. | Dinpendukcapil | 8 |
| 18. | Dinpermasdes | 2 |
| 19. | Dinhub | 2 |
| 20. | Dinkopukm | 2 |
| 21. | DPMPTSP | 1 |
| 22. | Dinporapar | 4 |
| 23. | Dinarspus | 1 |
| 24. | Dinpertan | 1 |
| 25. | Dinperindag | 3 |
| 26. | SatpolPP | 4 |
| 27. | Kemenag | 1 |
| 28. | Setda | 3 |
| 29. | Bakesbangpol | 1 |
| Jumlah | | 614 |

K. Review Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga

Evaluasi Perbup No. 7 Tahun 2021 tentang Satu Data Purbalingga dan Tindak Lanjut Rencana Aksi Satu Data Purbalingga Tahun 2024 dilaksanakan di Ruang Integrasi Bappelitbangda pada 23 Juli 2024. Berdasarkan hasil rapat evaluasi, terdapat beberapa hal yang perlu direvisi pada Perbup Nomor 7 Tahun 2021 antara lain:

- a. BAB VII Prosedur Pengelolaan Satu Data Bagian Ketiga Pasal 13 ayat (4)

- b. BAB VII Prosedur Pengelolaan Satu Data Bagian Ketiga Pasal 14 ayat (1)
- c. Judul Bagian Kesatu Tata Cara Menanggapi Permintaan Data diubah menjadi Bagian Kesatu Perencanaan Data.
- d. Isi Pasal 16 terkait tata cara menanggapi permintaan data dimasukkan setelah Pasal 28.
- e. Pasal 16 diisi dengan tahapan perencanaan data.
- f. Judul Bagian Ketiga Pengolahan Data diganti menjadi Bagian Ketiga Pemeriksaan Data. Isi dari Bagian Ketiga Pemeriksaan Data adalah Pasal 18 terkait Pengolahan Data, Pasal 19 terkait Verifikasi dan Validasi Data, pasal 23 terkait Analisis Data).

L. Penyusunan Publikasi Purbalingga Melalui Lensa Data

Buku Purbalingga Melalui Lensa Data merupakan publikasi data statistik sektoral yang divisualisasikan dalam bentuk infografis. Data statistik yang termuat meliputi data prioritas SDI Kabupaten Purbalingga tahun 2018 s.d 2023 yang dihimpun dari OPD di lingkup Kabupaten Purbalingga. Publikasi tersebut dapat diakses pada Portal Satu Data Kabupaten Purbalingga dan laman banggamacapat.purbalinggakab.go.id.



Gambar 12. Buku Purbalingga Melalui Lensa Data

M. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Walidata Daerah

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data dan informasi pada walidata sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kegiatan yang melibatkan analisis, pengelolaan dan pemanfaatan data. Beberapa kegiatan peningkatan kapasitas yang diikuti oleh walidata pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Bimbingan Teknis Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, dengan peserta OPD Pemprov Jawa Tengah dan Walidata pada masing masing

Kab/Kota se-Jawa Tengah pada tanggal 5-7 Agustus 2024 dengan materi Bimbingan Teknis adalah sebagai berikut:

- Konsep Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Pengetahuan Peta;
- Akses Ketersediaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
- Penyiapan Data Geospasial;
- Analisis Geostatistik (Integrasi Geospasial & Statistik)
- Layout Peta/Penyajian Peta;
- Metadata (Sikaming) dan Penyebarluasan Informasi Geospasial.

b. Pelatihan Big Data

Pelatihan *Big Data* diselenggarakan oleh Institut Teknologi Telkom Purwokerto (ITTP) yang bekerjasama dengan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. Pelatihan dilaksanakan pada 14 Juni 2024 di ITTP. Peserta pelatihan adalah Bidang ITIKSP Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. Adapun materi pelatihan meliputi Konsep *Big Data* dan *Big Data Management*.

c. Pelatihan Pemodelan Data Statistik Menggunakan Python

Pelatihan Pemodelan Data Statistik Menggunakan *Python* diselenggarakan oleh ITTP bekerjasama dengan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. Pelatihan dilaksanakan pada 17 September 2024 di Ruang Podcast Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. Pelatihan dan diikuti oleh Dinkominfo, Inspektorat, Bappelitbangda, BKPSDM, Dinpendukcapil, DPMPTSP, Dinperindag dan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga. Materi yang dibahas adalah pengenalan model klasifikasi *machine learning*.

N. Rekomendasi Statistik

Berdasarkan amanat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS dengan instansi pemerintah melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan statistik, salah satunya dalam bentuk Rekomendasi Kegiatan Statistik. Dalam Rangka melaksanakan amanat Undang-undang tersebut, ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang salah satu poinnya menjelaskan bahwa penyelenggara kegiatan statistik sektoral wajib:

1. Memberikan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral kepada BPS;
2. Mengikuti rekomendasi kegiatan statistik yang diberikan BPS; dan
3. Menyerahkan hasil penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral yang dilakukannya kepada BPS;

Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas untuk melakukan Pemeriksaan untuk seriap rekomendasi yang diajukan oleh Produsen Data sebelum mendapatkan Rekomendasi dari BPS.

Berikut adalah Kegiatan Statistik yang telah mendapatkan rekomendasi dari BPS

Tabel 6. Rekomendasi Statistik Terbit

| ID | Identitas Rekomendasi | Judul | Waktu Pengajuan | Instansi/OPD |
|---------------|-----------------------|---|-----------------|---|
| 038279 | K-24.3303.037 | Kompilasi Produk Administrasi Data Berat Badan Bayi Lahir Rendah Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 19 Juli 2024 | Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga |
| 038277 | K-24.3303.036 | Kompilasi Produk Administrasi Data Rasio Dokter Dan Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 19 Juli 2024 | Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga |
| 038273 | K-24.3303.039 | Kompilasi Data Kondisi Penyakit Tidak Menular Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 19 Juli 2024 | Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga |
| 038045 | K-24.3303.028 | Kompilasi Produk Administrasi Data Kebudayaan Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 08 Juli 2024 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga |
| 037657 | V-24.3303.005 | Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Mal Pelayanan Publik (Mpp) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 03 Juli 2024 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 037655 | K-24.3303.041 | Kompilasi Produk Administrasi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 09 Juli 2024 | Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB PP PA Kabupaten Purbalingga |
| 037651 | K-24.3303.027 | Kompilasi Produk Administrasi Cakupan | 09 Juli 2024 | Dinas Sosial Pengendalian |

| ID | Identitas Rekomendasi | Judul | Waktu Pengajuan | Instansi/OPD |
|---------------|-----------------------|--|-----------------|---|
| | | Pelayanan Bidang Sosial Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | | Penduduk KB PP PA Kabupaten Purbalingga |
| 037554 | K-24.3303.040 | Kompilasi Produk Administrasi Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 09 Juli 2024 | Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB PP PA Kabupaten Purbalingga |
| 037546 | K-24.3303.038 | Kompilasi Produk Administrasi Angka Kematian Neonatal (Akn) Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 19 Juli 2024 | Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga |
| 037297 | K-24.3303.034 | Kompilasi Data Pertanahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 28 Juni 2024 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 037296 | K-24.3303.020 | Kompilasi Data Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 19 Juni 2024 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 037238 | K-24.3303.018 | Kompilasi Produk Administrasi Data Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 19 Juni 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga |
| 037234 | K-24.3303.007 | Kompilasi Produk Administrasi Data Statistik Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 13 Juni 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga |
| 037227 | K-24.3303.011 | Kompilasi Produk Administrasi Data Persandian Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 13 Juni 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga |
| 037170 | K-24.3303.014 | Kompilasi Produk Administrasi Data Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 13 Juni 2024 | Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga |

| ID | Identitas Rekomendasi | Judul | Waktu Pengajuan | Instansi/OPD |
|--------|-----------------------|---|-----------------|--|
| 037169 | K-24.3303.005 | Kompilasi Produk Administrasi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Atas Aset Yang Menjadi Pendapatan Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 13 Juni 2024 | Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| 037168 | K-24.3303.017 | Kompilasi Produk Administrasi Data Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 13 Juni 2024 | Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| 037166 | K-24.3303.006 | Kompilasi Produk Administrasi Data Laporan Keuangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 13 Juni 2024 | Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| 037018 | K-24.3303.032 | Kompilasi Produk Administrasi Data Kondisi Jaringan Irigasi/Pengairan Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 1 Juli 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga |
| 037017 | K-24.3303.022 | Kompilasi Produk Administrasi Data Perencanaan Tata Ruang Dan Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 1 Juli 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga |
| 037016 | K-24.3303.030 | Kompilasi Produk Administrasi Data Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 5 Juli 2024 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga |
| 037014 | K-24.3303.024 | Kompilasi Produk Administrasi Data Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Dan Pendidikan Non Formal (Pnf) Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 5 Juli 2024 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga |

| ID | Identitas Rekomendasi | Judul | Waktu Pengajuan | Instansi/OPD |
|--------|-----------------------|---|-----------------|--|
| 036998 | K-24.3303.035 | Kompilasi Produk Administrasi Perencanaan Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 12 Juli 2024 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 036992 | K-24.3303.021 | Kompilasi Data Perumahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 25 Juni 2024 | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 036978 | K-24.3303.001 | Kompilasi Produk Administrasi Data Pembinaan Kearsipan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 12 Juni 2024 | Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Purbalingga |
| 036976 | K-24.3303.009 | Kompilasi Produk Administrasi Data Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 12 Juni 2024 | Dinas Kearsipan dan Kepustakaan Purbalingga |
| 036969 | K-24.3303.016 | Kompilasi Produk Administrasi Data Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 12 Juni 2024 | Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga |
| 036956 | V-24.3303.004 | Survei Kondisi Jalan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 28 Juni 2024 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga |
| 036955 | K-24.3303.004 | Kompilasi Produk Administrasi Data Investasi Pma Dan Pmdn Kabupaten Purbalingga Tahun Tahun 2024 | 13 Juni 2024 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 036934 | K-24.3303.029 | Kompilasi Produk Administrasi Data Pendidikan Tingkat | 5 Juli 2024 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| ID | Identitas Rekomendasi | Judul | Waktu Pengajuan | Instansi/OPD |
|---------------|-----------------------|--|-----------------|--|
| | | Sekolah Menengah Pertama (Smp) Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | | Kabupaten Purbalingga |
| 036872 | K-24.3303.043 | Kompilasi Produk Administrasi Data Peningkatan Kompetensi Pns Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 8 Juli 2024 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga |
| 036871 | K-24.3303.002 | Kompilasi Produk Administrasi Data Ruang Terbuka Hijau (Rth) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 12 Juni 2024 | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga |
| 036869 | K-24.3303.010 | Kompilasi Produk Administrasi Data Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 12 Juni 2024 | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga |
| 036862 | K-24.3303.042 | Kompilasi Produk Administrasi Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 12 Juni 2024 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga |
| 036811 | K-24.3303.026 | Kompilasi Produk Administrasi Profil Gender Dan Anak Kabupaten Purbalingga. Tahun 2024 | 9 Juli 2024 | Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB PP PA Kabupaten Purbalingga |
| 036798 | K-24.3303.019 | Kompilasi Produk Administrasi Data Fasilitas Perlengkapan Jalan Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 19 Juni 2024 | Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga |

| ID | Identitas Rekomendasi | Judul | Waktu Pengajuan | Instansi/OPD |
|--------|-----------------------|--|-----------------|--|
| 036795 | K-24.3303.025 | Kompilasi Produk Administrasi Data Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar (Sd) Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 5 Juli 2024 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga |
| 036784 | K-24.3303.015 | Kompilasi Produk Administrasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 12 Juni 2024 | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga |
| 036779 | V-24.3303.003 | Sensus Kendaraan Wajib Uji Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 19 Juni 2024 | Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga |
| 036769 | K-24.3303.008 | Kompilasi Produk Administrasi Data Indeks Desa Membangun (Idm) Dan Status Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 14 Juni 2024 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purbalingga |
| 036768 | K-24.3303.013 | Kompilasi Produk Administrasi Data Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 13 Juni 2024 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purbalingga |
| 036761 | K-24.3303.023 | Kompilasi Produk Administrasi Data Kegiatan Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 1 Juli 2024 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 036750 | K-24.3303.031 | Kompilasi Produk Administrasi Data Pelayanan, Pencegahan, Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 3 Juli 2024 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| ID | Identitas Rekomendasi | Judul | Waktu Pengajuan | Instansi/OPD |
|--------|-----------------------|--|------------------|--|
| 036742 | K-24.3303.003 | Kompilasi Produk Administrasi Data Kelembagaan Masyarakat Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 13 Juni 2024 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purbalingga |
| 036624 | K-24.3303.033 | Kompilasi Produk Administrasi Data Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 1 Juli 2024 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 031761 | V-24.3303.002 | Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 28 Februari 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga |
| 027645 | K-23.3303.001 | Kompilasi Produk Administrasi Angka Kematian Ibu Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 | 8 November 2023 | Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga |
| 012058 | K-22.3303.001 | Penyajian Data Agregat Semester 1 Tahun 2022 Tahun 2022 | 14 Juni 2022 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga |
| 009633 | V-24.3303.001 | Survei Layanan Pengaduan Berbasis Elektronik Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 | 25 Februari 2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga |

BAB IV

PENILAIAN KINERJA WALIDATA DAN RENCANA TINDAK LANJUT 2025

A. EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL (EPSS)

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

- a) mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
- b) meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan
- c) meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Di samping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.

Untuk EPSS Tahun 2024, kegiatan statistik sektoral Kabupaten Purbalingga yang adalah:

- a. Kompilasi Data Kematian Ibu Kabupaten Purbalingga Tahun 2023
- b. Kompilasi Data KTP-el Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

| Domain | Bobot | Nilai | Nilai Nasional | | Nilai Hasil Penilaian | |
|--------------------------------|-------|---------|----------------|------|-----------------------|------|
| | | Harapan | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| Prinsip SDI | 28% | 2,60 | 1,81 | 2,43 | 2,00 | 3,00 |
| Kualitas Data | 24% | 2,60 | 1,70 | 2,27 | 1,82 | 2,79 |
| Proses Bisnis Statistik | 19% | 2,60 | 1,82 | 2,47 | 2,32 | 2,36 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kelembagaan | 17% | 2,60 | 1,85 | 2,32 | 2,33 | 3,00 |
| Statistik Nasional | 12% | 2,60 | 1,74 | 2,20 | 1,89 | 2,89 |
| Indeks Pembangunan Statistik | 100% | 2,60 | 1,78 | 2,35 | 2,06 | 2,81 |

Tabel 8. Predikat Hasil EPSS

| Nilai | Predikat |
|-------------|-------------|
| 4,2 – 5,0 | Memuaskan |
| 3,5 - < 4,2 | Sangat Baik |
| 2,6 - < 3,5 | Baik |
| 1,8 - < 2,6 | Cukup |
| < 1,8 | Kurang |

Pada tahun 2024, EPSS Kabupaten Purbalingga mencapai 2,81 (kategori baik) dan mengalami peningkatan sebesar 0,75 dibanding tahun 2023. Adapun keunggulan, kekurangan dan rekomendasi untuk Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut.

Tabel 9. Keunggulan, Kekurangan dan Rekomendasi

| Domain | Keunggulan | Kekurangan | Rekomendasi |
|---------------------------|---|---|--|
| Domain Prinsip SDI | <p>a. Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah baik. Sudah ada kebijakan SDI yang mengatur tata kelola data di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang mencakup antara lain standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi dan/atau data induk.</p> <p>b. Penerapan Aspek Standar Data Statistik, Metadata Statistik, dan Kode Referensi dan/atau Data Induk sudah dilakukan oleh seluruh produsen data sesuai dengan yang diatur dalam Petunjuk</p> | Seluruh aspek pada Domain Prinsip Satu Data Indonesia di Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum ada yang mencapai predikat sangat baik atau belum ada indikator yang mencapai tingkat kematangan terpadu dan terukur. | Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu membuat reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan prinsip SDI serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan. |

| Domain | Keunggulan | Kekurangan | Rekomendasi |
|-----------------------------|---|---|---|
| | <p>Teknis Penyelenggaraan SDI Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dan Petunjuk Pelaksanaan Statistik Sektoral Kabupaten Purbalingga Tahun 2023. Variabel-variabel yang digunakan dan indikator-indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik di Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah menerapkan Standar Data Statistik Nasional dan satu kode referensi. Disamping itu, kegiatan statistik tersebut juga sudah dilengkapi dengan metadata statistik sesuai dengan struktur dan format baku yang ditetapkan oleh pembina data statistik. Statistik yang dihasilkan juga sudah menggunakan kode referensi kewilayahan dengan menerapkan bridging antara kode wilayah kerja statistik BPS dengan kode wilayah administrasi Kementerian Dalam Negeri.</p> | | |
| Domain Kualitas Data | <p>a. Penerapan Kualitas Data di Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sudah mencapai predikat baik. Sudah ada dokumen kebijakan berupa Peraturan Bupati Purbalingga No. 7/2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga yang mencakup Aspek</p> | <p>a. Belum seluruh aspek pada Domain Kualitas Data mencapai predikat baik dan belum seluruh indikator berada pada tingkat kematangan terdefinisi b. Penerapan Aspek Keterbandingan dan Konsistensi Statistik masih berada pada predikat cukup. Penerapan Indikator</p> | <p>a. Prosedur baku berupa petunjuk teknis yang disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga masih bersifat umum mengatur terkait penjaminan Keterbandingan dan Konsistensi Statistik. Sehingga perlu disusun prosedur</p> |

| Domain | Keunggulan | Kekurangan | Rekomendasi |
|---------------------------------------|---|---|---|
| | <p>Relevansi, Aspek Akurasi, Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu, Aspek Aksesibilitas, Aspek Keterbandingan dan Konsistensi.</p> <p>b. Kebijakan Peraturan Bupati tersebut dibuat turunan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (walidata) Kabupaten Purbalingga berupa petunjuk teknis pelaksanaan statistik sektoral Kabupaten Purbalingga yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data. Penerapan Aspek Relevansi, Aspek Akurasi, Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu, dan Aspek Aksesibilitas sudah berada pada predikat baik.</p> | <p>Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Belum ditemukan bukti dukung yang menunjukkan penerapan indikator tersebut.</p> | <p>baku yang lebih rinci dan mengikat serta diterapkan oleh seluruh produsen data.</p> <p>b. Prosedur baku tentang Penjaminan Keterbandingan dan Konsistensi Statistik yang disusun harus menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh produsen data untuk memastikan bahwa data informasi yang dihasilkan dapat konsisten ketika diperbandingkan dengan output dari sumber lain. Jika terjadi ketidakselarasan antardata, maka disediakan penjelasan mengenai hal tersebut untuk pengguna.</p> <p>c. Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu membuat jadwal revidi dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kualitas data serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.</p> |
| Domain Proses Bisnis Statistik | <p>Penerapan Aspek Pengumpulan Data dan Pemeriksaan Data di Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah berada pada predikat Baik. Sudah ada</p> | <p>a. Pada aspek Perencanaan Data masih dibutuhkan pendefinisian kebutuhan, desain</p> | <p>a. Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu menyusun proses bisnis statistik yang</p> |

| Domain | Keunggulan | Kekurangan | Rekomendasi |
|--------|--|--|--|
| | <p>standar yang mengatur tata cara pengumpulan dan pemeriksaan data di lingkungan Pemerintah Purbalingga Penerapan aspek ini sudah dilakukan oleh seluruh produsen data sesuai dengan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Statistik Sektoral Kabupaten Purbalingga.</p> | <p>serta penyiapan instrumen untuk kegiatan yang dilakukan. Diperlukan juga SOP serta petunjuk teknis yang selaras.</p> <p>b. Pada aspek Penyebarluasan Data masih dilakukan oleh masing-masing produsen data.</p> | <p>terstandar untuk proses pendefinisian kebutuhan statistik, desain statistik, penyiapan instrumen, dan diseminasi data, yang berlaku bagi seluruh produsen data.</p> <p>b. Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu melakukan penyiapan instrumen sebagai bagian dari tahapan proses bisnis statistik yang terstandar, antara lain membuat instrumen pengumpulan data, membangun komponen pengolahan dan analisis data, membangun komponen diseminasi data, menyusun alur kerja sesuai rancangan, menguji sistem dan instrumen, menguji proses bisnis statistik, dan finalisasi sistem.</p> <p>c. Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan proses bisnis statistik serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.</p> |

| Domain | Keunggulan | Kekurangan | Rekomendasi |
|---------------------------|---|--|--|
| Domain Kelembagaan | <p>a. Penerapan Aspek Profesionalitas terkait penjaminan netralitas dan objektivitas, kualitas data, dan konfidensialitas data telah dilakukan berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Statistik Sektoral Kabupaten Purbalingga.</p> <p>b. Penerapan Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang Memadai dan Kapabel sudah dilakukan secara menyeluruh di bidang proses bisnis statistik. Hal ini ditunjukkan dengan sudah tersedianya Analisis Beban Kerja (ABK) untuk fungsional statistisi dan pranata komputer, serta sudah ada pengembangan SDM di bidang statistik dan manajemen data yang diselenggarakan oleh walidata.</p> <p>c. Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait kolaborasi antar unit kerja di Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan oleh tim kerja yang dibentuk secara formal, di bawah arahan Bupati Purbalingga. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan BPS secara formal, salah satunya dengan adanya rekomendasi statistik.</p> <p>d. Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait penyelenggaraan</p> | <p>Penerapan Aspek Profesionalitas terkait penjaminan transparansi informasi statistik telah dilakukan oleh seluruh Produsen Data, namun bukti dukung belum menunjukkan adanya pelaporan metadata di aplikasi INDAH.</p> | <p>a. Seluruh Produsen Data perlu memenuhi penerapan Aspek Profesionalitas terkait penjaminan transparansi informasi statistik dengan melaporkan metadatanya ke aplikasi INDAH.</p> <p>b. Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu melakukan reuiu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Aspek Profesionalitas, pemenuhan Aspek SDM yang Memadai dan Kapabel, dan penguatan Aspek Pengorganisasian Statistik, serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas penerapan aspek tersebut.</p> |

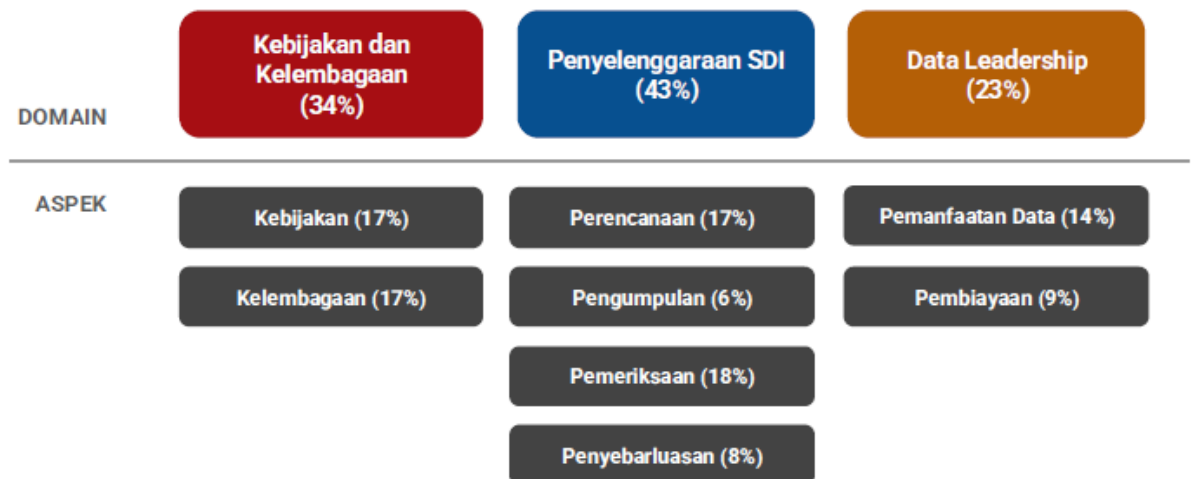
| Domain | Keunggulan | Kekurangan | Rekomendasi |
|---------------------------|--|---|---|
| | <p>forum SDI telah dilaksanakan oleh Walidata Pemerintah Kabupaten Purbalingga, melalui keterlibatan aktif walidata dalam Forum Satu Data Indonesia (SDI) dan pemenuhan rencana aksi yang disepakati dalam forum tersebut, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.</p> <p>e. Walidata di Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah sepenuhnya melaksanakan tugasnya sebagai walidata.</p> | | |
| Domain Statistik Nasional | <p>a. Penerapan Statistik Nasional di Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sudah mencapai predikat baik.</p> <p>b. Penerapan Aspek Pemanfaatan Data Statistik, Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik, dan Aspek Penguatan Sistem Statistik Nasional Berkelanjutan sudah berada pada predikat baik.</p> <p>c. Sudah ada dokumen formal yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga yang menggunakan data statistik dasar maupun statistik sektoral dimana</p> | <p>a. Belum seluruh indikator pada Domain Statistik Nasional berada pada tingkat kematangan terdefinisi.</p> <p>b. Penerapan Indikator Tingkat Kematangan Pemanfaatan Big Data belum digunakan untuk menghasilkan data statistik pendukung.</p> | <p>a. Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga atau Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga perlu memanfaatkan big data untuk menghasilkan data statistik pendukung.</p> <p>b. Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu membuat jadwal reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Statistik Nasional serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.</p> |

| Domain | Keunggulan | Kekurangan | Rekomendasi |
|--------|--|------------|-------------|
| | <p>prosesnya melibatkan produsen dan walidata.</p> <p>d. Sudah ada petunjuk teknis pelaksanaan statistik sektoral Kabupaten Purbalingga tentang sosialisasi data statistik kepada publik yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data.</p> <p>e. Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sudah memberitahukan rancangan kegiatan statistik ke BPS, dimana proses pemberitahuan rancangan kegiatan statistik sesuai petunjuk teknis yang berlaku di seluruh unit kerja dan sudah dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (walidata) Kabupaten Purbalingga. Rancangan kegiatan tersebut sudah mendapat rekomendasi dari BPS yang ditunjukkan dengan adanya surat rekomendasi untuk kegiatan statistik tersebut.</p> <p>f. Sudah ada perencanaan Pembangunan Statistik di Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga yang berpedoman pada dokumen Rencana Aksi Satu Data Purbalingga tahun 2022-2026.</p> <p>g. Penyebarluasan Data telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (walidata) Kabupaten Purbalingga melalui portal Satu Data</p> | | |

| Domain | Keunggulan | Kekurangan | Rekomendasi |
|--------|---|------------|-------------|
| | Indonesia dan Jaringan Informasi Geospasial Nasional. | | |

B. EVALUASI PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA (EPSDI)

Pada Oktober tahun 2024, Bappenas menyelenggarakan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (EPSDI) yang menggambarkan keseluruhan penyelenggaraan data secara *general* (termasuk Data Statistik dan Spasial), yang lebih mencakup penerapan Kelembagaan SDI, Prinsip Satu Data Indonesia, dan Data Leadership tingkat Pusat dan tingkat Daerah. Untuk Tahun 2024, evaluasi penyelenggaraan SDI dilakukan untuk memantau penyelenggaraan SDI tahun 2023.



Gambar 13. Struktur Penilaian EPSDI

C. SISTEM INFORMASI MONITORING INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL (SIMOJANG)

Bhumandala Award adalah penghargaan tingkat nasional yang diberikan BIG kepada simpul-simpul jaringan dengan tujuan untuk memotivasi, menginspirasi, memperkuat, dan meningkatkan semangat Kementerian/Lembaga, TNI, Polri maupun Pemerintah Daerah dalam membangun elemen-elemen simpul jaringannya agar terus terbina secara berkelanjutan menuju Simpul Jaringan yang optimal dan unggul. Penilaian untuk Bhumandala Award didasarkan pada pelaporan kinerja simpul jaringan pada laman SIMOJANG BIG. Terdapat 5 elemen infrastruktur pada SIMOJANG antara lain kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar dan sumber daya manusia.

Kabupaten Purbalingga berhasil meraih penghargaan Bhumandala Ariti (Medali Perunggu) untuk kategori Simpul Jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten. Berikut adalah kondisi profil simpul jaringan Kabupaten Purbalingga.

1) Domain Kebijakan dan Peraturan

Tabel 10. Domain Kebijakan dan Peraturan Simpul Jaringan Kabupaten Purbalingga

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|--|---|
| 1. | Pemenuhan Regulasi Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi belum disusun 2. Regulasi dalam proses pembahasan internal (masih berupa draft) 3. Regulasi sudah ditetapkan namun belum menunjuk unit penyelenggara JIGN 4. Regulasi sudah ditetapkan dan sudah menunjuk unit penyelenggara JIGN sesuai dengan amanat Perpres 27/2014 5. Regulasi sudah ditetapkan dan sudah sesuai serta sudah dilakukan reviu/evaluasi secara berkala |
| 2. | Pemenuhan regulasi penyelenggaraan Tata Kelola Data | <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi belum disusun 2. Regulasi dalam proses pembahasan internal (masih berupa draft) 3. Regulasi sudah ditetapkan, namun belum menunjuk pembina data spasial, statistik, walidata dan/atau produsen data 4. Regulasi sudah ditetapkan dan sudah menunjuk pembina data spasial dan statistik, walidata dan produsen data 5. Regulasi sudah ditetapkan dan sudah sesuai serta sudah dilakukan reviu/evaluasi secara berkala |
| 3. | Penyusunan daftar data spasial yang diproduksi oleh masing-masing OPD/unit teknis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi belum disusun 2. Regulasi dalam proses pembahasan internal (masih berupa draft) 3. Regulasi sudah ditetapkan, namun belum menyertakan seluruh unit teknis (OPD/Direktorat/Pusat) 4. Regulasi sudah ditetapkan dan sudah menyertakan seluruh unit teknis (OPD/Direktorat/Pusat) sebagai produsen data 5. Regulasi sudah ditetapkan dan sudah menyertakan seluruh unit teknis (OPD/Direktorat/Pusat) serta sudah dilakukan reviu/evaluasi secara berkala |
| 4. | Pemenuhan Dokumen Peta Jalan (roadmap) dan rencana kerja penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen roadmap belum disusun 2. Dokumen roadmap dalam proses pembahasan internal (masih berupa draft) 3. Dokumen roadmap sudah ditetapkan namun belum memiliki rencana kerja yang terukur 4. Dokumen roadmap sudah ditetapkan dan sudah memiliki rencana kerja yang terukur 5. Dokumen roadmap sudah ditetapkan dan sudah memiliki rencana kerja yang terukur serta sudah dilakukan reviu/evaluasi secara berkala |

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|---|---|
| 5. | Pemenuhan dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) atau SOP yang digunakan sebagai acuan teknis dalam penyelenggaraan informasi geospasial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen SOP belum disusun 2. Dokumen SOP dalam proses pembahasan internal (masih berupa draft) 3. Dokumen SOP sudah ditetapkan namun belum untuk seluruh kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial 4. Dokumen SOP untuk seluruh kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial sudah ditetapkan 5. Dokumen SOP untuk seluruh kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial sudah ditetapkan serta sudah dilakukan reviu/evaluasi secara berkala |
| 6. | Pemenuhan dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang sudah memuat terkait penyelenggaraan IG | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Renstra/RKPD belum disusun 2. Dokumen Renstra/RKPD dalam proses pembahasan internal (masih berupa draft) 3. Dokumen Renstra/RKPD sudah ditetapkan namun belum untuk seluruh kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial 4. Dokumen Renstra/RKPD yang memuat kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial sudah ditetapkan 5. Dokumen Renstra/RKPD sudah memuat kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial serta sudah dilakukan reviu/evaluasi secara berkala |
| 7. | Penyiapan alokasi anggaran rutin dalam APBD/APBN untuk penyelenggaraan informasi geospasial setiap tahun | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada anggaran khusus untuk penyelenggaraan IG 2. Anggaran untuk penyelenggaraan IG dalam proses pembahasan internal (masih berupa draft) 3. Anggaran untuk penyelenggaraan IG baru dilakukan satu tahun berjalan 4. Sudah ada penganggaran untuk penyelenggaraan IG lebih dari satu kali dalam jangka waktu 5 tahun 5. Sudah ada anggaran rutin untuk penyelenggaraan IG setiap tahun |

2) Domain Kelembagaan

Tabel 11. Domain Kelembagaan Jaringan Kabupaten Purbalingga

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|---|---|
| 1. | Penunjukan Unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG sesuai amanat Perpres No. 27 tahun 2014 pasal 5 ayat 2.a (Unit Produksi) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi belum disusun 2. Regulasi dalam proses pembahasan internal (masih berupa draft) 3. Regulasi sudah ditetapkan namun belum menunjuk unit penyelenggara JIGN 4. Regulasi sudah ditetapkan dan sudah menunjuk unit penyelenggara JIGN sesuai dengan amanat Perpres 27/2014 5. Regulasi sudah ditetapkan dan sudah sesuai serta sudah dilakukan reviu/evaluasi secara berkala |

| | | |
|----|---|--|
| 2. | Penunjukan Unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG sesuai amanat Perpres No. 27 tahun 2014 pasal 5 ayat 2.b | <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi belum disusun 2. Regulasi dalam proses pembahasan internal (masih berupa draft) 3. Regulasi sudah ditetapkan namun belum menunjuk unit penyelenggara JIGN 4. Regulasi sudah ditetapkan dan sudah menunjuk unit penyelenggara JIGN sesuai dengan amanat Perpres 27/2014 5. Regulasi sudah ditetapkan dan sudah sesuai serta sudah dilakukan reviu/evaluasi secara berkala |
| 3. | Penyelenggaraan forum koordinasi terkait pengelolaan data dan informasi geospasial secara berkala | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan forum koordinasi penyelenggaraan informasi geospasial belum pernah dilaksanakan Regulasi dalam proses pembahasan internal (masih berupa draft) 2. Kegiatan forum koordinasi penyelenggaraan informasi geospasial sudah dilaksanakan 3. Kegiatan forum koordinasi penyelenggaraan informasi geospasial sudah dilaksanakan serta menghasilkan rencana aksi yang disepakati bersama 4. Kegiatan forum koordinasi penyelenggaraan informasi geospasial telah dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi 5. Kegiatan forum koordinasi penyelenggaraan informasi geospasial sudah melakukan reviu dan evaluasi terhadap rencana aksi |
| 4. | Penyusunan kerja sama resmi terkait dengan penyelenggaraan informasi geospasial dengan BIG, instansi pemerintah lainnya dan atau perguruan tinggi (PPIIG/PPIDS) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki kerja sama dengan BIG, instansi pusat lainnya atau dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan informasi geospasial 2. Sudah memiliki kerja sama dengan BIG, instansi pusat lainnya, perguruan tinggi, atau mitra lainnya dalam penyelenggaraan informasi geospasial 3. Sudah memiliki kerja sama dengan BIG, instansi pusat lainnya dan dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan informasi geospasial 4. Sudah memiliki kerja sama dengan BIG, instansi pusat lainnya dan dengan perguruan tinggi yang dilengkapi dengan rencana kerja dalam penyelenggaraan informasi geospasial 5. Sudah memiliki kerja sama dengan BIG, instansi pusat lainnya dan dengan perguruan tinggi yang dilengkapi dengan rencana kerja serta telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas kerjasama |

3) Domain Teknologi

Tabel 12. Domain Teknologi Simpul Jaringan Kabupaten Purbalingga

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|--|--|
| 1. | Memiliki dan menggunakan perangkat keras untuk melakukan | 1. Belum memiliki perangkat keras pengumpulan data spasial |

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|--|--|
| | kegiatan produksi / pengumpulan data geospasial | <ol style="list-style-type: none"> 2. Sudah memiliki perangkat keras pengumpulan data di salah satu dinas/unit/direktorat unit produksi 3. Baru sebagian unit produksi yang memiliki perangkat keras pengumpulan data 4. Seluruh unit produksi sudah memiliki perangkat keras pengumpulan data 5. Seluruh unit produksi sudah memiliki perangkat keras pengumpulan data dan sudah dilakukan proses perawatan/kalibrasi secara berkala |
| 2. | Memiliki dan menggunakan perangkat lunak SIG untuk melakukan kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemanfaatan data geospasial vektor dan raster ? (Contoh: QGis, Arcgis, Envi, ERMapper, Global Mapper, dsb.) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki perangkat lunak pengelolaan data spasial 2. Sudah memiliki perangkat lunak pengelolaan data spasial di salah satu dinas/unit/direktorat unit produksi 3. Baru sebagian unit produksi yang memiliki perangkat lunak pengelolaan data spasial 4. Seluruh unit produksi sudah memiliki perangkat lunak pengelolaan data spasial 5. Seluruh unit produksi sudah memiliki perangkat lunak pengelolaan data spasial dan sudah dilakukan proses updating/pembaruan secara berkala |
| 3. | Pemanfaatan Teknologi Informatika dan Komunikasi untuk pengelolaan data/informasi geospasial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki perangkat keras khusus untuk pengelolaan data/informasi geospasial 2. Perangkat khusus untuk pengelolaan data/informasi geospasial masih dalam proses pengadaan/penganggaran 3. Sudah memiliki perangkat keras khusus pengelolaan data/informasi geospasial di salah satu dinas/unit/direktorat 4. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan IG/Walidata dan Unit Produksi/Produsen data sudah memiliki perangkat keras khusus untuk mengelola data/informasi geospasial 5. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan IG/Walidata sudah memiliki perangkat keras pengelola data/informasi geospasial dan sudah dilakukan proses updating/pembaruan secara berkala |
| 4. | Pemanfaatan geoportal untuk penyediaan katalog, map service, dan/atau data geospasial untuk publik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada 2. Geoportal masih dalam proses pembuatan (koneksi intranet) 3. Geoportal sudah online namun belum terkoneksi ke dalam Geoportal Nasional 4. Geoportal sudah online dan sudah terkoneksi ke dalam Geoportal Nasional (tanahair.indonesia.go.id) 5. Geoportal sudah online, terkoneksi dengan Geoportal Nasional dan sudah dimanfaatkan dalam proses berbagi pakai data |
| 5. | Pengembangan aplikasi spasial berbasis web (WebGIS) lain yang digunakan untuk pemanfaatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada WebGIS maupun Aplikasi berbasis data spasial |

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|---|--|
| | khusus seperti kebencanaan, tata ruang, perizinan, lingkungan hidup dll | <ol style="list-style-type: none"> 2. WebGIS atau Aplikasi berbasis data spasial masih dalam proses pembuatan 3. WebGIS atau Aplikasi berbasis data spasial sudah terinstal di server internal (intranet) 4. WebGIS atau Aplikasi berbasis data spasial sudah online namun dengan basis data yang terpisah dengan Geoportal 5. WebGIS atau Aplikasi berbasis data spasial sudah online dengan basis data yang terintegrasi dengan Geoportal |

4) Domain Standar

Tabel 13. Domain Standar Simpul Jaringan Kabupaten Purbalingga

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|---|---|
| 1. | Ketersediaan standar/pedoman data geospasial dari unit produksi dalam bentuk Spesifikasi Produk Data (SPD)/spesifikasi teknis lainnya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedia standar/pedoman DG/IG 2. Sudah tersedia standar/pedoman data namun belum sesuai dengan pedoman standar yang berlaku 3. Sudah tersedia standar/pedoman data yang sesuai dengan pedoman standar yang berlaku 4. Sebagian daftar data prioritas sudah memiliki standar/pedoman data sudah sesuai dengan pedoman standar yang berlaku dan telah ditetapkan dalam peraturan/regulasi di instansi setingkat eselon 1 5. Seluruh daftar data prioritas sudah memiliki standar/pedoman data sudah sesuai dengan pedoman standar yang berlaku dan telah ditetapkan dalam peraturan/regulasi |
| 2. | Implementasi Struktur Data sesuai dengan katalog unsur data yang berlaku | <ol style="list-style-type: none"> 1. DG/IG belum sesuai katalog unsur data 2. Terdapat kurang dari 25% DG/IG sudah sesuai katalog unsur data 3. Terdapat kurang dari 50% DG/IG sudah sesuai katalog unsur data 4. Terdapat kurang dari 75% DG/IG sudah sesuai katalog unsur data 5. Seluruh DG/IG sudah sesuai dengan katalog unsur data dan sudah didaftarkan dalam KUGI (Katalog Unsur Geografi Indonesia) |
| 3. | Penggunaan SRGI 2013 dalam Sistem referensi spasial untuk data dan informasi geospasial yang dimiliki | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada keterangan 2. Referensi spasial masih menggunakan format selain WGS 1984/SRGI 2013 3. 25% data menggunakan referensi geospasial WGS 1984/SRGI 2013 4. 50% data menggunakan referensi geospasial WGS 1984/SRGI 2013 5. 100% data menggunakan referensi geospasial WGS 1984/SRGI 2013 |

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|--|--|
| 4. | Implementasi manajemen kualitas dalam pengelolaan data dan informasi spasial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada implementasi manajemen kualitas 2. Proses Implementasi manajemen kualitas DG/IG sudah dilakukan, namun belum ada standar data (KAK/SPD/Regulasi terkait) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan 3. Proses Implementasi manajemen kualitas DG/IG sudah dilakukan untuk sebagian DG IG sesuai dengan standar data (KAK/SPD/Regulasi terkait) yang telah ditetapkan 4. Proses Implementasi manajemen kualitas DG/IG sudah dilakukan untuk seluruh DG IG sesuai dengan standar data (KAK/SPD/Regulasi terkait) yang telah ditetapkan 5. Proses Implementasi manajemen kualitas DG/IG sudah dilakukan untuk seluruh DG IG sesuai dengan standar data (KAK/SPD/Regulasi terkait) yang telah ditetapkan serta sudah dilakukan review terhadap dokumen standar data yang berlaku |
| 5. | Kelengkapan metadata spasial dalam data dan informasi geospasial yang telah diproduksi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh DG/IG belum dilengkapi dengan Metadata spasial 2. Sudah dilengkapi dengan metadata spasial namun tidak sesuai dengan standar 3. Sebagian DG/IG sudah dilengkapi dengan metadata spasial yang sesuai dengan standar 4. Seluruh DG/IG sudah dilengkapi dengan metadata spasial yang sesuai dengan standar 5. Seluruh DG/IG sudah dilengkapi dengan metadata spasial beserta informasi kualitas |

5) Domain Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel 14. Domain SDM Simpul Jaringan Kabupaten Purbalingga

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|---|---|
| 1. | Penyusunan Analisis Jabatan kebutuhan SDM bidang IG untuk pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan IG di lingkup instansi meliputi kebutuhan berdasarkan tingkat jabatannya (pelaksana/operator, ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada analisis jabatan untuk kompetensi bidang informasi geospasial 2. Analisis jabatan untuk kompetensi bidang informasi geospasial masih dalam proses penyusunan 3. Analisis jabatan untuk kompetensi bidang informasi geospasial sudah mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina (BIG) 4. Analisis jabatan untuk kompetensi bidang informasi geospasial sudah ditetapkan oleh pejabat terkait (pimpinan daerah/instansi/lembaga) 5. Regulasi sudah ditetapkan dan sudah sesuai serta sudah dilakukan reuiu/evaluasi secara berkala |
| 2. | Pemenuhan SDM bidang IG melalui jabatan fungsional Surveyor Pemetaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan |

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|---|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengisian Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui Pengadaan CASN JF Surta dalam proses pengajuan 3. Pengisian Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sudah dilakukan melalui Pengadaan CASN JF Surta dan/atau perpindahan dari jabatan lain 4. SDM dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sudah ada disalah satu Unit Teknis (pusat/OPD) 5. SDM dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sudah ada di lebih dari satu Unit Teknis (pusat/OPD) |
| 3. | <p>Pemenuhan kualifikasi pendidikan Sumber Daya Manusia untuk ASN (bukan JF Surta) dan Non ASN (tenaga kontrak) di bidang IG</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki SDM ASN dan Non ASN bidang Informasi Geospasial 2. SDM ASN dan Non ASN dengan kompetensi bidang informasi geospasial dalam proses pengajuan 3. SDM ASN dan Non ASN dengan kompetensi bidang informasi geospasial telah terpenuhi 4. SDM ASN dan Non ASN dengan kompetensi bidang informasi geospasial telah terpenuhi dan sudah dilakukan proses pembinaan (kursus, bimtek, pelatihan) secara rutin 5. SDM ASN dan Non ASN dengan kompetensi bidang informasi geospasial telah terpenuhi serta sudah memiliki sertifikat kompetensi bidang IG |
| 4. | <p>Pengembangan kapasitas Sumberdaya Manusia melalui kursus/pelatihan dalam bidang penyelenggaraan informasi geospasial</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada kursus/pelatihan khusus bidang penyelenggaraan informasi geospasial 2. Kursus/pelatihan khusus bidang penyelenggaraan informasi geospasial masih dalam tahap perencanaan 3. Kursus/pelatihan khusus bidang penyelenggaraan Informasi Geospasial sudah dilakukan namun belum memenuhi 20 JP/orang/tahun 4. Kursus/pelatihan khusus bidang penyelenggaraan informasi geospasial sudah dilakukan dan sudah memenuhi 20 JP/orang/tahun 5. Kursus/pelatihan khusus bidang penyelenggaraan Informasi Geospasial sudah dilakukan dan sudah memenuhi 20 JP/orang/tahun serta dilakukan secara rutin dan berkala |
| 5. | <p>Pengembangan kapasitas Sumberdaya Manusia melalui beasiswa pendidikan formal lanjutan (S1, S2, atau S3) di bidang informasi geospasial</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada program Beasiswa 2. Program Beasiswa masih dalam proses penyusunan 3. Program beasiswa khusus bidang Informasi Geospasial dengan penganggaran dari pihak lain (LPDP – Kemenkeu, Pusbin – Bappenas, luar negeri, dll) 4. Program Beasiswa khusus bidang Informasi Geospasial sudah dianggarkan secara internal 5. Program Beasiswa khusus bidang Informasi Geospasial sudah dianggarkan secara internal serta sudah dilakukan review dan pemutakhiran secara rutin |

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Menindaklanjuti hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024 yang disampaikan melalui Surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor B-562/01000/ES/2024 tanggal 17 September 2024 berikut adalah rencana tindaklanjut pada untuk pelaksanaan EPSS Tahun 2025.

Tabel 15. Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Statistik Sektoral

| Domain | Rekomendasi | Rencana Tindaklanjut |
|------------------------------------|---|---|
| Prinsip Satu Data Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu membuat reuiu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan prinsip SDI serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan. | <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Kegiatan Reuiu dan Evaluasi Secara Berkala Penerapan Prinsip SDI |
| Kualitas Data | <ul style="list-style-type: none"> Prosedur baku berupa petunjuk teknis yang disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga masih bersifat umum mengatur terkait penjaminan Keterbandingan dan Konsistensi Statistik. Sehingga perlu disusun prosedur baku yang lebih rinci dan mengikat serta diterapkan oleh seluruh produsen data. Prosedur baku tentang Penjaminan Keterbandingan dan Konsistensi Statistik yang disusun harus menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh produsen data untuk memastikan bahwa data informasi yang dihasilkan dapat konsisten ketika diperbandingkan dengan output dari sumber lain. Jika terjadi ketidakselarasan antara data, maka disediakan penjelasan mengenai hal tersebut untuk pengguna. Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu membuat jadwal reuiu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kualitas data serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan. | <ul style="list-style-type: none"> Reuiu Petunjuk Teknis agar lebih rinci dan mengikat terkait penjaminan keterbandingan dan Konsistensi Statistik Penyusunan Jadwal Reuiu dan Evaluasi secara berkala Peningkatan Kapasitas SDM di bidang penyelenggaraan Statistik Sektoral Optimalisasi publikasi statistik sektoral yang sesuai dengan jadwal rilis |
| Proses Bisnis Statistisk | <ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu menyusun proses bisnis statistik yang terstandar untuk | <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Proses Bisnis Statistik yang terstandar |

| Domain | Rekomendasi | Rencana Tindakan Lanjut |
|---------------------------|--|--|
| | <p>proses pendefinisian kebutuhan statistik, desain statistik, penyiapan instrumen, dan diseminasi data, yang berlaku bagi seluruh produsen data.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu melakukan penyiapan instrumen sebagai bagian dari tahapan proses bisnis statistik yang terstandar, antara lain membuat instrumen pengumpulan data, membangun komponen pengolahan dan analisis data, membangun komponen diseminasi data, menyusun alur kerja sesuai rancangan, menguji sistem dan instrumen, menguji proses bisnis statistik, dan finalisasi sistem. • Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan proses bisnis statistik serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan. | <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Reviu dan Evaluasi secara berkala terhadap penerapan proses bisnis |
| Kelembagaan | <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Produsen Data perlu memenuhi penerapan Aspek Profesionalitas terkait penjaminan transparansi informasi statistik dengan melaporkan metadatanya ke aplikasi INDAH. • Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Aspek Profesionalitas, pemenuhan Aspek SDM yang Memadai dan Kapabel, dan penguatan Aspek Pengorganisasian Statistik, serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas penerapan aspek tersebut. | <ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan Metadata melalui INDAH • Pelaksanaan Reviu dan Evaluasi Aspek Profesionalitas, SDM |
| Statistik Nasional | <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga atau Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga perlu memanfaatkan big data untuk menghasilkan data statistik pendukung. • Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu membuat jadwal reviu dan evaluasi secara berkala terhadap | <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan Big Data untuk menghasilkan data Statistik Pendukung • Jadwal Reviu dan Evaluasi secara berkala terhadap penerapan Statistik Nasional |

| Domain | Rekomendasi | Rencana Tindaklanjut |
|--------|---|----------------------|
| | penerapan Statistik Nasional serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan. | |

Adapun rencana tindak lanjut dari penyelenggaraan data spasial adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Data Spasial

| Domain | Rencana Tindaklanjut |
|---|---|
| Kebijakan | <ul style="list-style-type: none"> • Reviu/evaluasi Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga, Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial, SOP penyelenggaraan data dan informasi geospasial, Roadmap Geospasial, dokumen Renstra/RKPD yang memuat kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial . |
| Kelembagaan | <ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan kerjasama dengan BIG dan PPIDS UGM. • Berkoordinasi dengan koordinator forum satu data, pembina data dan produsen data dalam penyelenggaraan informasi geospasial |
| Teknologi | <ul style="list-style-type: none"> • Perawatan/kalibrasi perangkat keras pengumpulan data secara berkala • Pembaharuan perangkat lunak pengelolaan data spasial secara berkala • Pembaharuan perangkat keras pengelola data/informasi geospasial secara berkala • Integrasi WebGIS dengan Geoportal |
| Standar, Data dan Informasi Geospasial | Reviu dokumen standar data |
| Sumber Daya Manusia | <ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan dan pengadaan JF Surveyor Pemetaan • Pelatihan penyelenggaraan informasi geospasial secara berkala • Reviu dan pemutakhiran secara rutin program beasiswa khusus bidang informasi geospasial yang sudah dianggarkan |

BAB V

PENUTUP

Penyelenggaraan Kegiatan Urusan Statistik Sektoral di Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari 3 sub Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral, Membangun Metadata dan Pengembangan Infrastruktur.

Penyelenggaraan Data Statistik dan Geospasial Tingkat Kabupaten Purbalingga merupakan bagian penting dari Penyelenggaraan Satu Data Purbalingga yang terdiri dari Data Statistik (Data Prioritas dan Data E-Walidata SIPD), Data Spasial dan Data Keuangan. Diseminasi Data:

1. Data Prioritas di Laman <https://data.purbalinggakab.go.id>
2. Data E-Walidata SIPD di laman <https://sipd.go.id>
3. Data Spasial di laman <https://geoportal.purbalinggakab.go.id>

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah Kompilasi Data Kematian Ibu Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 (Dinas Kesehatan) dan Kompilasi Data KTP-e Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Pada Tahun 2024 memperoleh Indeks Pembangunan Statistik sebesar 2.81 (Predikat Baik) yang sebelumnya 2.06 atau naik sebesar 0.75.

Adapun rencana tindak lanjut hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral tahun 2024 antara lain:

1. Pelaksanaan Kegiatan Reviu dan Evaluasi Secara Berkala Penerapan Prinsip SDI
2. Reviu Petunjuk Teknis agar lebih rinci dan mengikat terkait penjaminan keterbandingan dan Konsistensi Statistik
3. Penyusunan Jadwal Reviu dan Evaluasi secara berkala terhadap penerapan Proses Bisnis, Aspek Profesionalitas SDM dan Statistik Nasional
4. Penyusunan Proses Bisnis Statistik yang terstandar
5. Pelaporan Metadata melalui INDAH
6. Pemanfaatan Big Data untuk menghasilkan data Statistik Pendukung
7. Peningkatan Kapasitas SDM di bidang penyelenggaraan Statistik Sektoral

Dalam Penyelenggaraan Data Spasial terdapat beberapa indikator diantaranya Domain Kebijakan Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Domain Kelembagaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Domain Teknologi Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Domain

Standar Data dan Informasi Geospasial serta Domain Sumber Daya Manusia Bidang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

Pada Tahun 2024 Kabupaten Purbalingga Meraih Medali Perunggu dalam Bhumandala Award 2024. Adapun Rencana Peningkatan Kinerja Simpul Jaringan adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Teknologi TIK, Perangkat Keras Pemetaan (GPS, geodetic/mapping, Drone), Perangkat Lunak Sistem
2. Geoportal Beroperasi dengan Metadata yang lengkap dan selalu diperbarui
3. Ketersediaan Data dan Metadata sesuai dengan Standar dan Penjaminan Kualitas
4. Kuantitas dan Kualifikasi Staf Penyelenggaraan IG
5. Pengadaan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
6. Program Peningkatan Kapasitas SDM di bidang Geospasial
7. Pelaksanaan Forum Satu Data.
8. Keterlibatan Aktif OPD dalam Penyelenggaraan IG
9. Tindak Lanjut Kerjasama dengan BIG dan PPIDS UGM
10. Review Regulasi, Roadmap dan Kebijakan Teknis.
11. Pencantuman Kegiatan Penyelenggaraan IG dalam RPJMD.
12. Anggaran untuk Geospasial dalam APBD